

## BAB 4

### TEMUAN STUDI DAN ANALISIS DATA

#### 4.1 Kondisi Makro Daerah Sebagai Dasar Rasionalitas

Gambaran makro kemiskinan di tiga Kabupaten lokasi penelitian, di Propinsi Jawa Timur, sengaja ditampilkan secara garis besar, untuk menunjukkan 'setting' daerah studi yang mendasari rasionalitas mengapa sebagian penduduk bermigrasi (sementara) ke luar negeri untuk melawan kemiskinannya. Menurut Data dan Informasi Kemiskinan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik - Jakarta, (2003) dinyatakan bahwa, jumlah dan persentase penduduk miskin (P1 dan P2)\* dan batas garis kemiskinan pendu

---

\* Perhitungan penduduk miskin tahun 2003 pada tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan data Susenas Kor. Metode yang digunakan untuk perhitungan tersebut di dasarkan pada hukum Engel. Menurut Engel, semakin miskin kondisi seseorang, maka semakin tinggi proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan. Untuk mendapatkan angka index kedalaman kemiskinan (P1) dan index keparahan kemiskinan (P2), dilakukan dengan 12 langkah perhitungan.

\* Index kedalaman kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan. Semakin tinggi nilai index (P1) ini, semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, index keparahan kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan

\* Penjelasan lengkap dan rinci tentang cara perhitungan ini dapat dibaca pada terbitan BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003, Buku : 2 Kabupaten", (BPS, 2003 ; Jakarta, Penerbit CV. Nasional, halaman : 1- 8 ).

duk untuk propinsi, kabupaten/kota di Jawa Timur (seperti ditampilkan dalam Buku : 2 Kabupaten tersebut), dan uraian selengkapnya dapat ditulis kembali sebagai berikut.

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 tercatat paling tinggi di antara lima propinsi yang ada di pulau Jawa (termasuk DKI dan DIY) yakni sebesar 7. 578.100 jiwa , atau sekitar 20,93 % dari total penduduk Jawa Timur pada tahun tersebut. Propinsi lain di pulau Jawa seperti Jawa Barat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun 2003 tercatat di bawah itu, sebesar 4. 898.800 jiwa, dengan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 12,90. Propinsi Jawa Tengah berada pada urutan berikutnya, dengan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 6. 979.800 jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 21,78 %. Sementara untuk DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah penduduk miskin paling kecil yaitu 294.100 jiwa, (persentase penduduk miskin 3,42 %) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 636.800 jiwa, (dengan persentase penduduk miskin 19,85 %) pada tahun yang sama (lihat : BPS, 2003; Buku : 2 hal. 6 - 8)

Gambaran yang lebih konkrit tentang kondisi makro kemiskinan penduduk di propinsi Jawa Timur, dan terutama di daerah kabupaten yang menjadi sasaran pengamatan, akan dikemukakan pula pada bagian ini, guna

menunjukkan kondisi riil lapangan, dimana telah terjadi apa yang oleh Nasikun (2006) disebut sebagai 'dislokasi sosial' di daerah asal - yang kemudian diyakini menjadi faktor pendorong sebagian penduduk wanita ini untuk bermigrasi ke luar negeri sementara waktu, guna memperoleh pekerjaan serta meningkatkan pendapatannya.

Untuk mendapatkan gambaran kemiskinan penduduk yang lebih konkrit tersebut, salah satu indikator yang dipakai oleh BPS, 2003 (dalam mengukur tingkat kemiskinan ini) adalah dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, yang ditulis dengan notasi P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Distributionally Sensitive Index*, yang ditulis dengan notasi P2) yang dirumuskan oleh Foster, Greer dan Thorbecke (1984). Oleh karena itu, rumus perhitungan kemiskinan ini kemudian lebih dikenal dengan formula *FGT index*.

Melalui perhitungan *FGT index* tersebut, diketahui P1 (*index* kedalaman kemiskinan) penduduk di propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 adalah sebesar 3,80 sedangkan P2 (*index* keparahan kemiskinan) propinsi ini pada tahun yang sama adalah sebesar 1.02 (BPS, Buku : 2, 2003: 8) Ini berarti bahwa, tingkat kesejangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Jawa Timur terhadap garis kemiskinan, ternyata cukup tinggi (hampir mendekati nilai 4). Sementara gambaran tingkat intensitas atau keparahan kemiskinan penduduk di propinsi ini, tercatat sebesar 1.02, ini berarti masih

berada di bawah nilai ambang batas DSI (*Distributionally Sensitive Index*). Dengan kata lain, kondisi kemiskinan penduduk di propinsi Jawa Timur secara makro belum begitu parah, bila dibandingkan dengan propinsi Jawa Tengah yang hampir mendekati nilai DSI = 2 ( $P2 = 1,07$ ) dan Propinsi DIY yang memiliki  $P2 = 1,09$  (BPS, Buku : 2 , 2003 : 7 - 8)

Selanjutnya, dilihat dari kondisi kemiskinan penduduk di tiga wilayah kabupaten penelitian, dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut. Kabupaten Tulungagung pada tahun 2003 memiliki jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 160. 300 jiwa, sementara kabupaten Blitar sebesar 190.900 jiwa dan terbesar kabupaten Malang yakni 426.100 jiwa penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di kabupaten Tulungagung tercatat paling rendah dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya, yakni sebesar 16,70 % ; sedang untuk kabupaten Blitar tercatat sebesar 17,19 % dan kabupaten Malang mencapai 18,24 % (BPS, Buku : 2, 2003 : 8)

Indeks kedalaman kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) untuk kabupaten Tulungagung tercatat sebesar 3.02, dan indeks keparahan kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) sebesar 0,79. Untuk kabupaten Blitar, nilai *Poverty Gap Index* (P1) tercatat 2,56 ; dan nilai DSI (P2) sebesar 0,54 sementara kabupaten Malang nilai *Poverty Gap Index* (P1) tercatat 3,13 ; dan nilai DSI (P2) sebesar 0,79 (BPS, Buku : 2, 2003: 8)

Dari besaran nilai *PGI* dan *DSI* penduduk di tiga kabupaten penelitian ini dapat digambarkan lebih lanjut bahwa, rata-rata tingkat kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di wilayah ini terhadap batas garis kemiskinan nya sudah relatif tinggi (di atas nilai 3). Selanjutnya menurut BPS (Buku: 2, 2003 : 8) , batas garis kemiskinan propinsi Jawa Timur yang dihitung dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan (dalam Rp) adalah sebesar Rp.121.695,- Jika kriteria batas garis kemiskinan Propinsi Jawa Timur ini digunakan, maka untuk ke tiga kabupaten penelitian (Tulungagung, Blitar dan Malang) ternyata semuanya berada di bawah rata-rata garis kemiskinan propinsi Jawa Timur.

Untuk kabupaten Tulungagung batas Garis Kemiskinan yang dihitung dari (Rp/Kapita/bulan) adalah sebesar Rp.118.185,- sedang untuk kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp. 109.407 ,- sementara untuk kabupaten Malang tercatat sebesar Rp. 110.629,- saja (BPS, Buku : 2, 2003 : 8) Implikasi yang dapat ditarik dari kondisi tersebut adalah, pertama; secara pukul rata, berarti seluruh pendapatan mereka hanya habis untuk kebutuhan makan saja. Kedua, sulitnya memperoleh lapangan kerja yang layak di pertanian (yang sudah sangat jenuh) telah memaksa orang bekerja apa adanya dengan penghasilan yang juga seadanya yakni dibawah Rp. 200.000,- per bulan (dengan asumsi, sehari mendapat Rp. 4.000 x 31 hari = Rp. 124.000,-).

Disamping itu, hasil penelitian SEAMEO Biotrop (seperti dimuat dalam JIPTUMM, tgl. 09/8/2003; <http://www.cc.msnschache.com/cache.aspx?q> ) juga menemukan kenyataan serupa bahwa, memang telah terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di Jawa Timur. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi serta mengetahui ketimpangan antar kabupaten di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yakni data PDRB tiap kabupaten dan propinsi Jawa Timur selama 8 tahun, dari tahun 1994-2001. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi Klassen, indeks Williamson dan indeks Entropi Theil, kemudian trend dan korelasi Pearson. (informasi lengkap dapat dilihat dalam JIPTUMM, (09/08/2003; <http://www.cc.msnschache.com/cache.aspx?q> )

Hasil analisis tipologi Klassen menunjukkan bahwa kabupaten Tulungagung, Blitar, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Nganjuk, Tuban dan Bangkalan termasuk dalam kategori kabupaten berkembang cepat karena mengirim TKI. Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Sampang, Pamekasan dan Kota Blitar termasuk kota/kabupaten relatif tertinggal ( JIPTUMM, 09/08-2003; <http://www.cc.msnschache.com/cache.aspx?q>)

Dengan kondisi makro seperti itu, maka dapat dipahami bahwa , mengapa sebagian penduduk terutama wanita di pedesaan di beberapa kabupaten di Jawa Timur ini (khususnya Tulungagung, Blitar dan Malang)

mulai banyak yang mengalami dislokasi sosial, akibat dari efek domino krisis ekonomi dan moneter pertengahan Juli 1997 yang tidak segera dapat diatasi, ditambah lagi adanya berbagai perubahan sosial politik di tanah air dalam lima tahun terakhir, yang secara langsung ataupun tidak langsung turut memperburuk situasi penyediaan lapangan kerja di daerah.

#### **4.2 Setting Sosial, Ekonomi dan Demografi Penelitian**

Kondisi kemiskinan penduduk, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan sosial, ekonomi dan politik selama satu dasa warsa terakhir seperti digambarkan di atas, membawa dampak sangat besar pada perubahan struktur hubungan antara laki-laki dan wanita, yang dapat dilihat dari peran dan beban kerja para wanita dalam keluarga petani di pedesaan. Dalam kondisi miskin seperti itu, kaum wanita dalam rumah tangga tani di pedesaan dewasa ini tidak hanya memikul beban pekerjaan domestiknya saja -- akan tetapi mereka juga harus "rela" berbagi tambahan pekerjaan di luar rumah dengan suaminya -- termasuk mencari sumber penghasilan tambahan di luar tanggung jawab domestiknya.

Dipihak lain, ketidak berdayaan laki-laki (suami) dalam ekonomi keluarga, sebagai pencari nafkah utama keluarga (karena menganggur), kian diperburuk lagi oleh rayuan, provokasi dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh para calo atau *Teikong* tenaga kerja wanita, (yang

menawarkan kesempatan kerja dan upah yang relatif lebih besar serta kemudahan berangkat ke luar negeri) kian memperkuat dugaan pergeseran hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita dalam keluarga tani di pedesaan ini.

Secara perlahan tetapi pasti, kondisi beban ekonomi bahkan tanggung jawab sosial wanita (dibandingkan laki-laki di pedesaan) yang timpang seperti ini, akan membawa degradasi terhadap otoritas kultural lokal dalam keluarga migran yang petani itu. Tidak hanya itu saja, analisis awal terhadap hasil pengamatan kasus perceraian yang telah terjadi dalam keluarga migran dalam studi ini menunjukkan bahwa, pilihan wanita bermigrasi ke luar negeri untuk memperbaiki kesejahteraan keluarganya - sesungguhnya memberikan indikasi telah terjadi 'Emansipasi' dalam bentuk (semacam) "*perlawanan laten terhadap Fatwa Haram MUI* " , bahkan juga terhadap "*Norma Syari'at dan adat* " dari pada perlawanan terhadap struktur kekuasaan regional atau Birokrasi imigrasi (nasional maupun internasional) .

Secara demografis, ada bukti yang menunjukkan bahwa migrasi wanita ke luar negeri (sebagai TKW ) menjadi semakin penting dewasa ini, terutama karena adanya permintaan pasar kerja sangat besar di sektor domestik, yang tidak lagi diminati oleh tenaga kerja setempat (Nasution, 1997 : iv)



Setting daerah penelitian ini akan menjadi bahan acuan penting di dalam analisis selanjutnya, terutama untuk menemukan implikasi dari studi ini.

### 4.3 Deskripsi Umum Daerah Penelitian Kabupaten Malang

Sebagaimana telah disinggung di dalam uraian Bab 3 laporan ini, bahwa lokasi pengamatan terhadap ke dua kelompok sampel penelitian (TKW legal dan Ilegal) ini dilaksanakan di 15 desa dari sekitar 6 Kecamatan

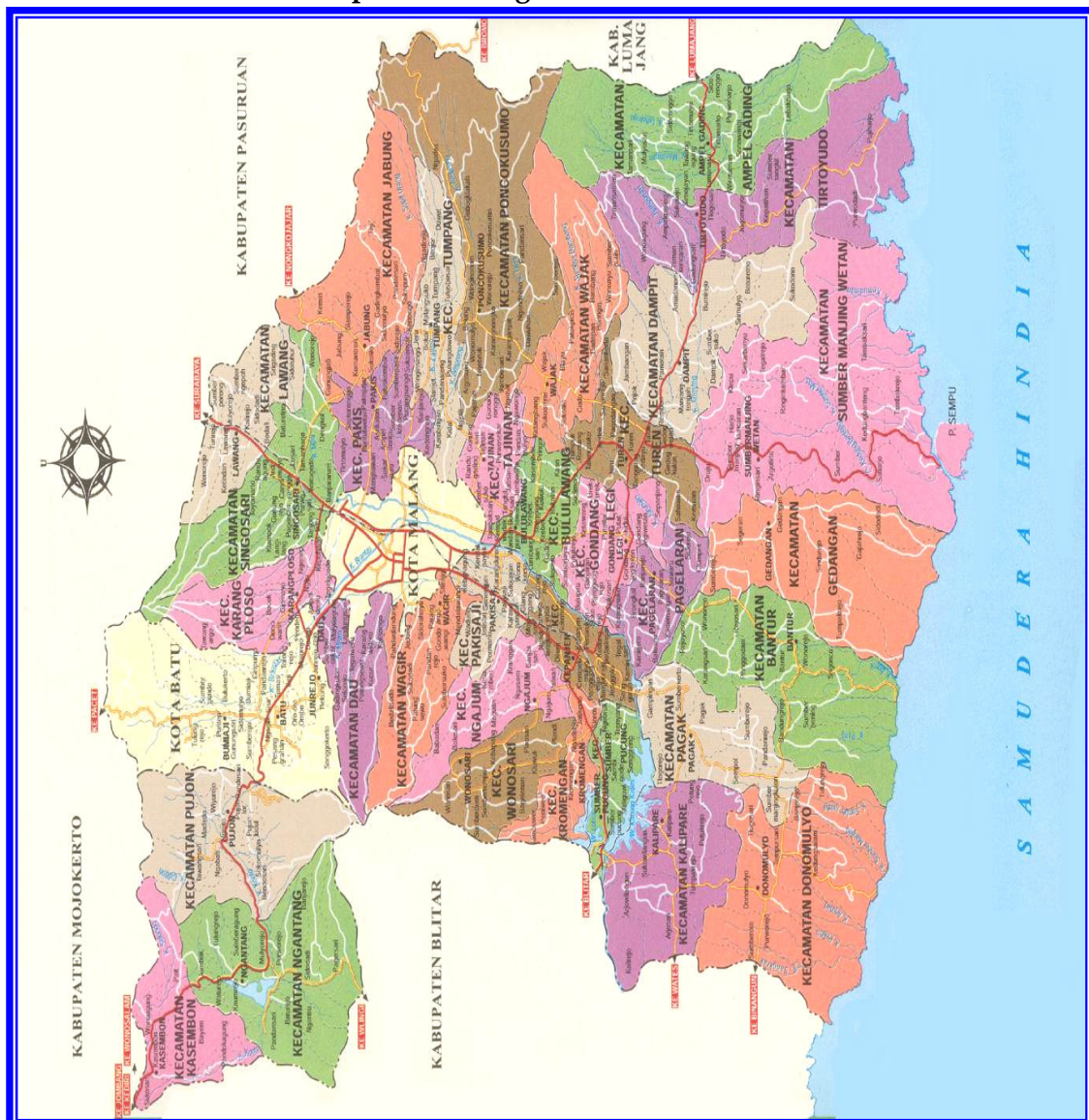
**Gambar : 4.1. Peta Propinsi Jawa Timur**



Sumber : A Chaldun, 2004. Atlas Jawa Timur, PT. Karya Pembina Swajaya

yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar dan Tulungagung. Ke enam Kecamatan tersebut adalah; (1) Kecamatan Kepanjen dan Sumbermanjing Wetan - Kabupaten Malang; (2) Kecamatan Garum dan Kanigoro - Kabupaten Blitar, serta (3) Kecamatan Besuki dan Kalidawir - Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur (Gambar : 4.1).

**Gambar : 4.2. Peta Kabupaten Malang**



Sumber : A. Chaldun, 2004. Atlas Jawa Timur, PT Karya Pembina Swajaya.

#### 4.3.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah.

Dari letak geografis dapat diketahui bahwa, Kabupaten Malang terletak pada posisi 112° 17' 10" sampai dengan 122° 57' 00" Bujur Timur, dan antara 7° 44' 55" sampai dengan 8° 26' 36" Lintang Selatan. Sebagai kawasan di bagian selatan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang sejak dulu dikenal sebagai daerah pegunungan dan perbukitan yang berhawa sejuk dan subur. Tetapi predikat sebagai kota sejuk nampaknya sudah banyak berubah, sebab disiang hari di pusat-pusat kota - udara mulai terasa menyengat, karena proses pemanasan global dari asap kendaraan bermotor dan berkurangnya hutan serta "*open space*" di wilayah ini. Menurut Stasiun Klimatologi-Karangploso-Kabupaten Malang; tahun 2004, suhu udara maksimum rata-rata di wilayah ini mencapai 32,4 °C ; terjadi pada bulan April, dan suhu terendah rata-rata mencapai 14,4 °C terjadi pada bulan-bulan Juni (Laporan BMG, Balai Wilayah III, Karangploso, Malang, 2005).

Luas wilayah Kabupaten Malang menurut data tahun 2005 adalah 3.347,8 km<sup>2</sup> dengan topografi bukit kapur di bagian selatan yang sebagian besar relatif kurang subur, berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan perbukitan di bagian utara yang relatif lebih subur. Daerah-daerah yang sangat subur dengan pengairan yang baik dan teratur terdapat di bagian utara, tengah dan di bagian timur kabupaten Malang. Dibandingkan dengan 37 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten

Malang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar ke dua setelah Kabupaten Banyuwangi.

Dari luas wilayah sebesar itu, lebih dari 50% di antaranya (152.126 Ha) telah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, baik sawah (46.433 Ha) tegalan (91,300 Ha) maupun untuk perkebunan (14.393 Ha). Sisanya, (46.477 Ha) diperuntukkan bagi pemukiman penduduk atau hanya sekitar 13,68% dari seluruh luas Kabupaten Malang (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005:2-4).

Curah hujan, berdasarkan data tahun 2004, tertinggi terjadi pada bulan Nopember yakni 298 mm dengan 23 hari hujan terutama untuk Kecamatan-kecamatan Dampit, dan Ampelgading, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan-bulan Mei, Juni dan Juli, yaitu hanya mencapai 8 - 115 mm; dengan 1 hingga 9 hari hujan. Bahkan untuk wilayah selatan sama sekali tidak ada hujan pada bulan-bulan tersebut (BPS ; Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005: 27-28).

#### **4.3.2 Batas Administratif Wilayah.**

Kabupaten Malang terbagi ke dalam 33 Kecamatan, 377 desa dan 12 kelurahan; dengan 2.953 RW dan 14.665 RT. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1996 tentang Juklak Kepmendagri 25 Tahun 1996, klasifikasi desa/kelurahan di Kabupaten ini sudah berada pada tingkat swadaya sebanyak 295 desa/kelurahan dan tingkat swakarsa sebanyak 94

desa/kelurahan. Secara administratif Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar, dan Kediri disebelah barat, disebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Disebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang; disebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

#### **4.3.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk.**

Berdasarkan data hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Malang tercatat sebanyak 2.264.757 jiwa; terdiri dari 1.128.347 penduduk laki-laki (49,46%), dan 1.146.410 penduduk perempuan (50,54%), dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,64% pertahun serta kepadatan rata-rata sebesar 921 orang per km. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,45% pada tahun 2001 - 2002, sedang pada tahun 2003- 2004, terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,83% rata-rata setiap tahunnya (BPS; Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005: 41-42).

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, maka dari 33 wilayah kecamatan di Kabupaten Malang, ada 12 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk di atas 1000 orang per km<sup>2</sup>. Wilayah kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 2.000 orang per km<sup>2</sup> hanya

satu yakni Kecamatan Kepanjen, mencapai 2.019 orang per km<sup>2</sup>. Kenyataan ini sangat mudah dipahami, sebab kecamatan Kepanjen, disamping sebagai daerah *antipode* bagi Kabupaten Blitar, juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah kecamatan Donomulyo yakni hanya sebesar 338 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 1000 orang per km<sup>2</sup>; terdapat di kecamatan-kecamatan; Turen dengan 1.646 orang per km<sup>2</sup>; kecamatan Pakis dengan 1.946 orang per km<sup>2</sup>; kemudian kecamatan Pakisaji dengan kepadatan 1.837 orang per km<sup>2</sup>; kecamatan Pagelaran dengan 1.335 orang per km<sup>2</sup> dan kecamatan lainnya (Tabel 4.1).

Daerah-daerah kecamatan dengan kepadatan penduduk di bawah 500 orang per km, sebagian besar berada di bagian tengah dan selatan Kabupaten Malang meliputi: kecamatan Pagak,(488 orang/km<sup>2</sup>); kecamatan Bantur (411 orang/km<sup>2</sup>); kecamatan Gedangan (378 orang/km<sup>2</sup>); Sumbermanjing (364 orang/km<sup>2</sup>);Tirtoyudo (403 orang/km<sup>2</sup>); kecamatan Pujon, dan Ngantang masing-masing 459 dan 362 orang/km<sup>2</sup> (BPS: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005 : 44). Gambaran tentang distribusi penduduk Kabupaten Malang per Kecamatan dan tingkat kepadatannya, dapat dilihat dari data sebagaimana disajikan di dalam Tabel 4.1 , di halaman 107 berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kab.Malang per Kecamatan**

Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Donomulyo	192,60	65.027	338
2. Kalipare	105,39	60.365	573
3. Pagak	90,08	43.978	488
4. Bantur	159,15	65.417	411
5. Gedangan	130,55	49.353	378
6. Sumbermanjing	239,49	87.137	364
7. Dampit	135,31	114.713	848
8. Tirtoyudo	141,96	57.216	403
9. Ampelgading	79,60	51.864	652
10. Poncokusumo	102,99	88.448	859
11. Wajak	94,56	75.887	803
12. Turèn	63,90	105.200	1.646
13. Bululawang	49,36	62.830	1.273
14. Gondanglegi	79,74	74.392	933
15. Pagelaran	45,83	61.178	1.335
16. Kepanjen	46,25	93.391	2.019
17. Sumberpucung	35,90	51.676	1.439
18. Kromengan	38,63	36.898	955
19. Ngajum	60,12	45.530	757
20. Wonosari	48,53	41.576	857
21. Wagir	75,43	66.794	886
22. Pakisaji	38,41	70.561	1.837
23. Tajinan	40,11	47.361	1.181
24. Tumpang	72,09	71.126	987
25. Pakis	53,62	104.364	1.946
26. Jabung	135,89	66.067	486
27. Lawang	68,23	90.468	1.326
28. Singosari	118,51	139.594	1.178
29. Karangploso	58,74	60.759	1.034
30. Dau	41,96	53.867	1.284
31. Pujon	130,75	59.984	459
32. Ngantang	147,70	53.496	362
33. Kasembon	55,67	27.898	501
Jumlah : th. 2003	2.977,05	2.264.757	754

Sumber : BPS ; Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005 :44.

#### 4.3.4 Agama dan Mata Pencaharian Penduduk

Seperti kebanyakan daerah pesisir di Jawa Timur, penduduk di Kabupaten Malang ini juga mayoritas menganut Agama Islam yakni sekitar 96,01%. Penduduk yang menganut agama Kristen tercatat 2,0%, Katolik

1,17%, penganut Hindu tercatat sebanyak 0,12 dan pemeluk Budha hanya 0,7% saja. Mata pencaharian penduduk terbesar di Kabupaten Malang, masih menekuni bidang pertanian, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan dan perkebunan. Dari sekitar 75% (1.688.186 orang) penduduk dalam usia kerja di Kabupaten ini, sebagian besar (70 %) tercatat sebagai Angkatan Kerja yang tersebar di beberapa sektor; antara lain; pertanian (karena masih merupakan mata pencaharian kebanyakan penduduk 32%), disusul kemudian oleh bidang industri (17%) perkebunan (16%), dan perdagangan (16%), selanjutnya bidang jasa pelayanan (15%) transportasi (2,3 %) dan sektor perikanan dan peternakan sebesar 1,7 % saja (BPS: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2004 :49-51). Data yang rinci mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di setiap sektor kegiatan ekonomi tidak tersedia; tetapi secara garis besar, dapat digambarkan bahwa, sektor pertanian (mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan) masih merupakan sektor yang dominan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Malang. Kenyataan ini juga nampak makin diperkuat oleh kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten ini nampak paling tinggi jika dibandingkan dengan sumbangan sektor perdagangan, dan industri pengolahan. Pada tahun 2004 tercatat kenaikan PDRB sebesar 12,96% dibandingkan tahun 2003 ; dan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor pertanian tanaman pangan (25,36%),



disusul kemudian oleh sektor industri jasa perhotelan (20,82%), dan sektor industri olahan sebesar 20,50% (BPS: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005 : 289).

#### **4.3.5 Struktur Penduduk dan Angkatan Kerja.**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Malang tahun 2005, dapat diketahui bahwa struktur penduduk Kabupaten Malang tergolong muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia 0-14 tahun masih sekitar 25%, sedangkan kelompok usia 15-64 tahun berkisar 64,12 % sedangkan penduduk di atas 65 tahun ada sekitar 10,88%. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang, tahun 2005 ; bahwa jumlah Angkatan Kerja (*labor force*) seluruhnya tercatat sebesar 1.587.854 orang atau sekitar 70% dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten ini, maka berarti ada sekitar 94% tenaga kerja yang sudah terserap ke berbagai sektor kegiatan ekonomi yang lazim disebut Angkatan Kerja, sebagaimana di paparkan di atas. Dengan demikian sisanya (6%) adalah mereka yang masih mencari pekerjaan atau biasanya dimasukkan dalam kategori menganggur. Sebagai gambaran kasar Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja, menurut pendidikan dan jenis kelamin, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Pencari Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	205	468	673
SMTP	1.190	1.036	2.226
SMTA	20.336	10.958	31.294
Diploma 1 dan 2	357	607	964
Diploma 3	865	1.153	2.018
Sarjana	8.416	9.680	18.096
Jumlah	31.369	23.902	55.271

Sumber : BPS: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005 : 57-58.

Sementara itu, dilihat dari perkembangan jumlah angkatan kerja yang sudah disalurkan sejak saat krisis ekonomi, menurut lapangan pekerjaan lima tahun terakhir dari tahun 1998 hingga tahun 2002, yang tertinggi adalah lapangan kerja di sektor pertanian, (hortikultura) perburuhan, kehutanan dan perikanan, yakni sebanyak 7.001 orang pada tahun 1998. Tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan drastis menjadi 2.663 pada tahun 1999; pada tahun 2001 naik menjadi 2.708, dan turun lagi menjadi 2.427 orang saja pada tahun 2002. Urutan berikutnya adalah lapangan kerja di sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 1998, telah disalurkan sebanyak 4.675 orang tenaga kerja di sektor ini, kemudian pasca krisis pada tahun 1999 naik menjadi 5.776 orang, tetapi tahun berikutnya turun lagi menjadi 4.138 orang, dan naik lagi pada tahun 2001 menjadi 5.803 orang kemudian turun lagi menjadi 3.228 orang saja tahun 2002 (Tabel 4.3).

**Tabel 4.3**  
**Angkatan Kerja yang Disalurkan**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan 1999-2003**

Lapangan Pekerjaan	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan	7.001	2.663	1.327	2.708	2.427
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	1.352	458	771	654	158
4. Listrik, Gas dan Air	-	36	26	-	142
5. Bangunan/Konstruksi	56	24	33	7	-
6. Perdagangan, Hotel, Rm makan	349	202	203	296	-
7. Transportasi/Pergudangan	152	127	54	111	-
8. Jasa Kemasyarakatan	4.675	5.776	4.138	5.803	3.228
Jumlah	13.585	9.286	6.552	9.598	5.955

Sumber : Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2004.

Sementara itu, angkatan kerja yang telah disalurkan menurut tingkat pendidikan sejak tahun 1999 hingga 2003 adalah sebagai berikut. Angkatan kerja yang berpendidikan SD menempati jumlah terbesar yang telah disalurkan ke beberapa lapangan pekerjaan. Tahun 1999 ada 9.585 orang lulusan SD yang disalurkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Tahun 2000 jumlah tersebut menurun menjadi 5.577 orang; tahun 2001 turun lagi menjadi 2.879 orang, tetapi tahun 2002 naik lagi menjadi 5.248 orang sebelum turun lagi pada 2003 menjadi 2.958 orang saja. Lulusan SLTP yang telah disalurkan ke beberapa lapangan pekerjaan menempati urutan kedua sebesar 12.350 orang selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 1999 - 2003. Lulusan SLTA, yang telah disalurkan selama kurun waktu tersebut mencapai 6.171 orang; sedangkan lulusan Diploma dan Sarjana S-1; yang telah disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan, masing-

masing sebesar 40 orang dan 198 orang (Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2004 : 62).

Disamping penyaluran tenaga kerja ke berbagai sektor kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Malang, Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang selama kurun waktu lima tahun terakhir; sejak 1999 yang lalu, juga telah menyalurkan sejumlah tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL); Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Secara garis besar jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui AKL, AKAD dan AKAN sebagai berikut.

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL) sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 mencapai 3.986 orang; jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 ada sebanyak 17.633 orang; sedangkan jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui Antar Kerja Antar Negara sejak periode tahun tersebut ada sebanyak 29.317 orang. Dibandingkan dengan penyaluran tenaga kerja melalui AKL dan AKAD, nampak jelas bahwa, penyaluran tenaga kerja melalui AKAN (ke luar negeri) khususnya sebagai TKI justru paling besar jumlahnya selama kurun waktu lima tahun terakhir (Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2004) \* (*Data terbaru belum tersedia*)

#### **4.4. Deskripsi Umum Daerah Penelitian Kabupaten Blitar**

Lokasi pengamatan dan pengumpulan data primer yang ke dua adalah di Kabupaten Blitar, khususnya di enam desa yang merupakan wilayah dua kecamatan yaitu kecamatan Kanigoro dan kecamatan Garum sebagaimana nampak dalam peta Kabupaten Blitar Gambar 4.3.

##### **4.4.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah**

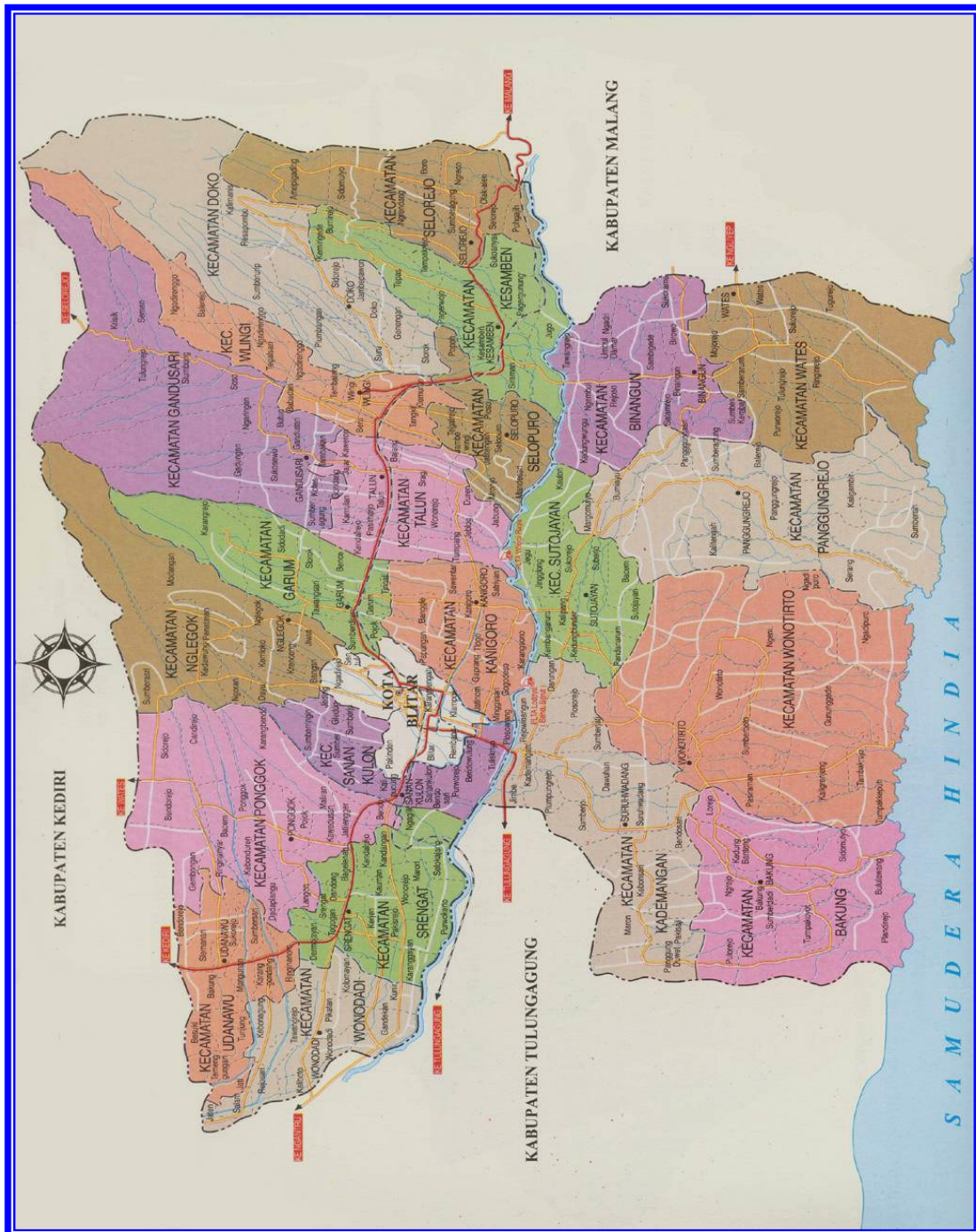
Kabupaten Blitar mempunyai luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup>, terletak antara 111° 40' dan 112°10' Bujur Timur dan 7° 58' sampai 8° 9'51" lintang selatan. Kabupaten ini berada pada ketinggian antara 92 hingga 420 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Kabupaten Blitar dibelah oleh sungai besar yakni sungai Brantas, yang menyebabkan adanya pembagian wilayah Blitar Selatan meliputi luas 689,85 km<sup>2</sup>, dan wilayah Blitar Utara yang memiliki luas 898,94 km<sup>2</sup>. Dari kondisi topografis, Kabupaten Blitar dapat dibedakan menjadi dua sub area, yakni area dataran tinggi di belahan utara yang jauh lebih subur meliputi kecamatan-kecamatan Gandusari, Doko, Wlingi, Selorejo, Talun dan Garum; sedangkan kawasan Blitar Selatan merupakan daerah bukit kapur yang relatif kurang subur, meliputi wilayah kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo dan kecamatan Wates. Seluruhnya ada sekitar 16 sungai besar-kecil yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar

dengan panjang bervariasi mulai dari 6 hingga 56 km, yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian; mulai padi hingga hortikultura. Sebagian besar wilayah Kabupaten Blitar bagian utara, sebenarnya merupakan kawasan pegunungan, dan hutan, karena di bagian utara Kabupaten ini terdapat gunung berapi yang masih aktif yakni Gunung Kelud. Dari wilayah pegunungan ini mengalir beberapa sungai besar dan kecil dan keadaan ini sangat menguntungkan bagi lahan persawahan yang sebagian besar terdapat di bagian utara. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Blitar bagian utara rata-rata berhawa sejuk terutama pada malam, pagi dan sore hari. Sisanya merupakan lahan pemukiman dan tegalan atau pekarangan (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 : 3).

Secara administratif, Kabupaten Blitar berbatasan dengan 3 wilayah Kabupaten lain yakni ,dengan Kabupaten Malang disebelah timur ; dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat; dan dengan wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri di sebelah utara, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 Kecamatan dengan 28 kelurahan dan 220 desa, serta 763 dusun (lingkungan). Dilihat dari komposisi jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Blitar, Kecamatan Srengat memiliki jumlah desa paling banyak, yakni 16 buah desa, sementara Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan

Wonotirto, dengan luas wilayah 164,54 km<sup>2</sup> (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :17- 24).

**Gambar 4.3. Peta Kabupaten Blitar**



Sumber : A.Chaldun, 2004. Atlas Jawa Timur, PT Karya Pembina Swajaya.

#### 4.4.2. Iklim dan Curah Hujan

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2004, curah hujan tertinggi di wilayah Kabupaten ini terjadi pada bulan-bulan Nopember (14.764 mm) hingga Januari (15.690 mm), dengan puncaknya pada bulan Desember mencapai 18.422 mm, dengan jumlah hari hujan antara 16 hingga 19 hari. Sementara itu, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yakni hanya mencapai 11 mm, dengan jumlah hari hujan sebanyak 1-4 hari saja (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :11).

#### 4.4.3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan

Menurut data hasil registrasi penduduk akhir tahun 2005, Kabupaten Blitar mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.115.955 jiwa, terdiri dari 553.852 penduduk laki-laki dan 562.103 penduduk perempuan, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,44% pertahun (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 : 52-53). Menurut data registrasi penduduk akhir tahun 2005, *sex ratio* penduduk di Kabupaten Blitar selama periode tahun 1999-2003, tercatat stabil yakni sekitar 99; tetapi pada akhir tahun 2004 *sex ratio* ini turun menjadi 97. Ini berarti jumlah penduduk perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, atau setiap 100 penduduk perempuan



terdapat sekitar 97 penduduk laki-laki. Kondisi ini hampir merata di setiap Kecamatan, kecuali di Kecamatan Gandusari dan Nglegek.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blitar ternyata juga mengalami kenaikan setiap tahun, kecuali tahun 2002-2003. Pada tahun 2000 tingkat kepadatan penduduk berada pada angka 688 orang per km<sup>2</sup>. Angka ini meningkat menjadi 690 pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 tingkat kepadatan penduduk meningkat lagi menjadi 694, dan pada tahun 2003 tingkat kepadatan tetap tidak berubah yakni sebesar 694, tetapi pada akhir tahun 2004 angka tersebut telah mencapai 702 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :53). Gambaran tentang distribusi penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk, disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini.

Dilihat dari penyebaran penduduk per kecamatan pada Tabel 4.4, nampak bahwa kecamatan - kecamatan Sutojayan, Kanigoro, Talun, Garum, Srengat, Wonodadi dan Sanan Kulon memiliki tingkat kepadatan rata-rata di atas 1000 orang per km<sup>2</sup>. Dalam kenyataan, wilayah kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi (di atas seribu orang per km<sup>2</sup>) umumnya, merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti di kecamatan Srengat, Wonodadi, Garum dan Sanan Kulon. Di kecamatan yang disebutkan paling akhir yaitu kecamatan Sanan Kulon, sangat mudah dimengerti mengapa kecamatan kota ini memiliki kepadatan penduduk terbesar (1.432 orang per

km<sup>2</sup>) jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, terutama disebabkan oleh terpusatnya aktivitas pemerintahan (Ibu Kota Kabupaten Blitar) dan perekonomian di wilayah kecamatan ini.

**Tabel 4.4**  
**Kepadatan Penduduk Akhir Tahun Menurut Kecamatan**  
**Dan Jenis Kelamin Tahun 2005**

Kecamatan	Luas wilayah	Laki-laki	Perempuan	Kepadatan
1. Bakung	111,24	14.571	14.887	265
2. Wonotirto	164,54	19.346	19.901	239
3. Pangungrejo	119,04	21.771	21.252	361
4. W a t e s	68,76	15.496	15.751	454
5. Binangun	76,79	22.396	22.234	581
6. Sutojayan	44,20	22.699	22.799	1.029
7. Kademangan	105,28	31.298	31.390	595
8. Kanigoro	55,35	31.473	31.189	1.128
9. T a l u n	49,76	28.580	29.061	1.158
10.Selopuro	39,29	19.457	19.447	992
11.Kesamben	56,95	24.997	26.677	907
12.Selorejo	52,23	20.374	25.482	878
13.D o k o	70,93	20.409	20.671	579
14.Wlingi	66,36	26.089	26.998	800
15.Gandusari.	88,23	35.451	35.334	802
16.G a r u m	54,56	27.467	27.768	1.012
17.Nglegok.	92,56	31.577	32.031	687
18.Sanankulon.	33,33	23.716	24.026	1.432
19.Ponggok	103,83	46.834	45.862	893
20.Srengat	53,98	29.366	29.617	1.093
21.Wonodadi	40,35	20.960	20.676	1.032
22.Udanawu	40,95	19.435	19.050	939
Jumlah	1.588,79	553.852	562.103	702

Sumber : BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka,2005: 52-53)

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, maka Kabupaten Blitar sebenarnya dapat diklasifikasi kedalam struktur umur penduduk muda, karena masih sebagian besar penduduk Kabupaten ini berada pada kelompok umur 0-14 tahun ada 23,3%; sedangkan kelompok umur 15- 64

tercatat sebanyak 64,7% dan 65 ke atas tercatat sebesar 12% (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :47).

#### **4.4.4. Agama dan Mata Pencaharian Penduduk**

Agama yang dianut oleh hampir seluruh penduduk Kabupaten Blitar (93,7%) adalah agama Islam, sedangkan agama lainnya yang dianut oleh sebagian kecil penduduk (6,3%) di Kabupaten ini antara lain, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Secara rinci, jumlah pemeluk Protestan tercatat sebanyak 2,3%; Penganut Katholik 1,8%; Penganut Hindu ada sebanyak 2% dan Penganut Budha ada sebanyak 0,2% (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :131).

Data mengenai mata pencaharian penduduk Kabupaten Blitar secara rinci, tidak tersedia; berapa persen penduduk di Kabupaten ini yang masih bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan juga berapa persen penduduk yang bekerja di luar sektor-sektor tersebut. Tetapi secara garis besar gambaran tentang mata pencaharian penduduk di Kabupaten ini, dapat diketahui dari tata guna lahan secara umum.

Menurut data yang dipublikasi oleh BPS Kabupaten Blitar, tahun 2005; luas seluruh lahan pertanian di Kabupaten ini tercatat sekitar 57% atau separuh lebih dari total luas wilayahnya. Dari luas lahan pertanian sebesar itu, persentase luas lahan persawahan tercatat sebesar 19,96%; lahan

perkebunan dan tegalan tercatat paling besar yakni 34,79%; lahan untuk rumah dan pekarangan tercatat sebesar 27,48%, sedangkan sisanya 17,77% merupakan areal hutan, dan peruntukan lainnya. Dari lahan persawahan seluas 31.706 Ha (19,96%) tersebut, terdapat lahan sawah berpengairan teknis sebesar 67,01% ; lahan sawah dengan pengairan setengah teknis ada 11,37%, sisanya sawah dengan irigasi biasa (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :147).

Hasil-hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta industri olahan yang penting yang dihasilkan oleh Kabupaten Blitar dalam empat tahun terakhir antara lain; padi, jagung, nanas, rambutan, durian, kakau, cengkeh, tembakau, tepung tapioka, telur ayam ras, dan daging ayam potong. Hasil industri yang penting dari Kabupaten ini, antara lain industri olahan yang didominasi oleh industri kecil seperti garmen, gula kelapa, minyak atsiri (kenanga). Produksi buah rambutan sejak tahun 2000 tercatat sebesar 23.407 kuintal; tahun 2001 meningkat menjadi 43.497 kuintal, tetapi tahun 2002 turun drastis menjadi 13.729 kuintal saja. Pada akhir tahun 2003, produksi buah nanas mencapai jumlah 67.040 kuintal. Produksi tembakau juga mengalami pasang surut. Tahun 2001 total produksi mencapai 29.072,50 kuintal; naik menjadi 44.515,00 kuintal pada tahun 2002. Tahun berikutnya, produksi tembakau ini kembali membaik dan mencapai 44.922,50 kuintal

meskipun pada tahun berikutnya turun lagi menjadi 26.873,23 kuintal saja (BPS : Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005:170).

#### **4.4.5. Angkatan Kerja**

Sebagai Kabupaten dengan struktur umur penduduk muda, maka mudah dipahami bahwa, kalau jumlah tenaga kerjanya juga sangat besar. Tenaga kerja disini dikonsepsikan sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun hingga 64 tahun. Jika diasumsikan bahwa, semua penduduk usia 15 tahun di Kabupaten ini masuk ke dalam kategori "*economically active population*" dan besarnya angkatan kerja di Kabupaten Blitar diukur menggunakan standard ILO (*International Labour Organization*) yaitu penduduk usia 15 tahun hingga 64 tahun, maka untuk Kabupaten Blitar, jumlah angkatan kerjanya berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Kabupaten ini tahun 2005, mencapai angka 62,7% dari total penduduknya (BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2005 :62-64).

Disisi lain, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir (1999-2003) terus mengalami kenaikan, namun kenaikannya sangat kecil. Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Kabupaten ini hanya 1,18%; kemudian naik menjadi 2,05% pada tahun 2001, tahun berikutnya, menjadi 2,77% dan menjadi 3,54% pada akhir tahun 2003. Jumlah angkatan kerja yang besar ini, akan memberikan implikasi persoalan pada

penyediaan lapangan pekerjaan yang amat berat bagi Kabupaten Blitar, apalagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (akhir tahun 2003) hanya sebesar 3,54% saja.

Gambaran mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) baik laki-laki maupun wanita di wilayah ini (tenaga kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan) sulit diperoleh, karena tidak tersedianya data tentang jumlah orang bekerja dan di sektor mana saja angkatan kerja tersebut terserap. Tetapi dari data tentang jumlah tenaga kerja yang terdaftar mencari pekerjaan menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Blitar ini kiranya cukup dipakai sebagai gambaran, bahwa selama lima tahun terakhir cukup banyak pencari kerja dari berbagai tingkat pendidikan dari daerah ini yang belum memperoleh pekerjaan, atau masuk kategori menganggur.

Data yang disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini, menunjukkan bahwa, jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan, yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar kurun waktu lima tahun terakhir, ternyata didominasi oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas baik yang umum maupun berasal dari SMTA kejuruan. Jumlah kelompok pencari kerja ini mencapai 8.163 orang terdiri dari SMTA jurusan umum sebanyak 3.286 orang sedangkan dari kejuruan mencapai 4.877 orang. Urutan berikutnya ditempati oleh kelompok pencari kerja dari lulusan SLTP, jumlahnya mencapai 4.754 orang baik umum maupun kejuruan. Kelompok

Sarjana menempati urutan ke tiga, dengan jumlah pencari kerja sebesar 2.761 orang . Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang disajikan berikut ini.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Kabupaten Blitar Tahun 1999 - 2003**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Sekolah dasar	138	2.367	2.505
2. Sekolah lanjutan Tk.Pertama			
2.1. SLTP Umum	242	2.135	2.377
2.2. SLTP Kejuruan	242	2.135	2.377
2.3. Kursus-Kursus setingkat SMTP	--	--	--
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3.658	4.505	8.163
3.1. SLTA Umum	989	2.297	3.286
3.2. SLTA Kejuruan	2.669	2.208	4.877
3.3. Kursus-Kursus setingkat SLTA	--	--	--
4. Sarjana Muda atau Sederajat	338	409	747
5. Sarjana (S-1)	1.680	1.081	2.761
Jumlah Keseluruhan th 2003	6.056	10.497	16.553
Jumlah keseluruhan th 2002	1.322	14.502	15.824
Jumlah keseluruhan th 2001	4.781	12.023	16.804
Jumlah keseluruhan th 2000	3.343	8.408	11.751
Jumlah keseluruhan th 1999	3.414	11.828	15.242

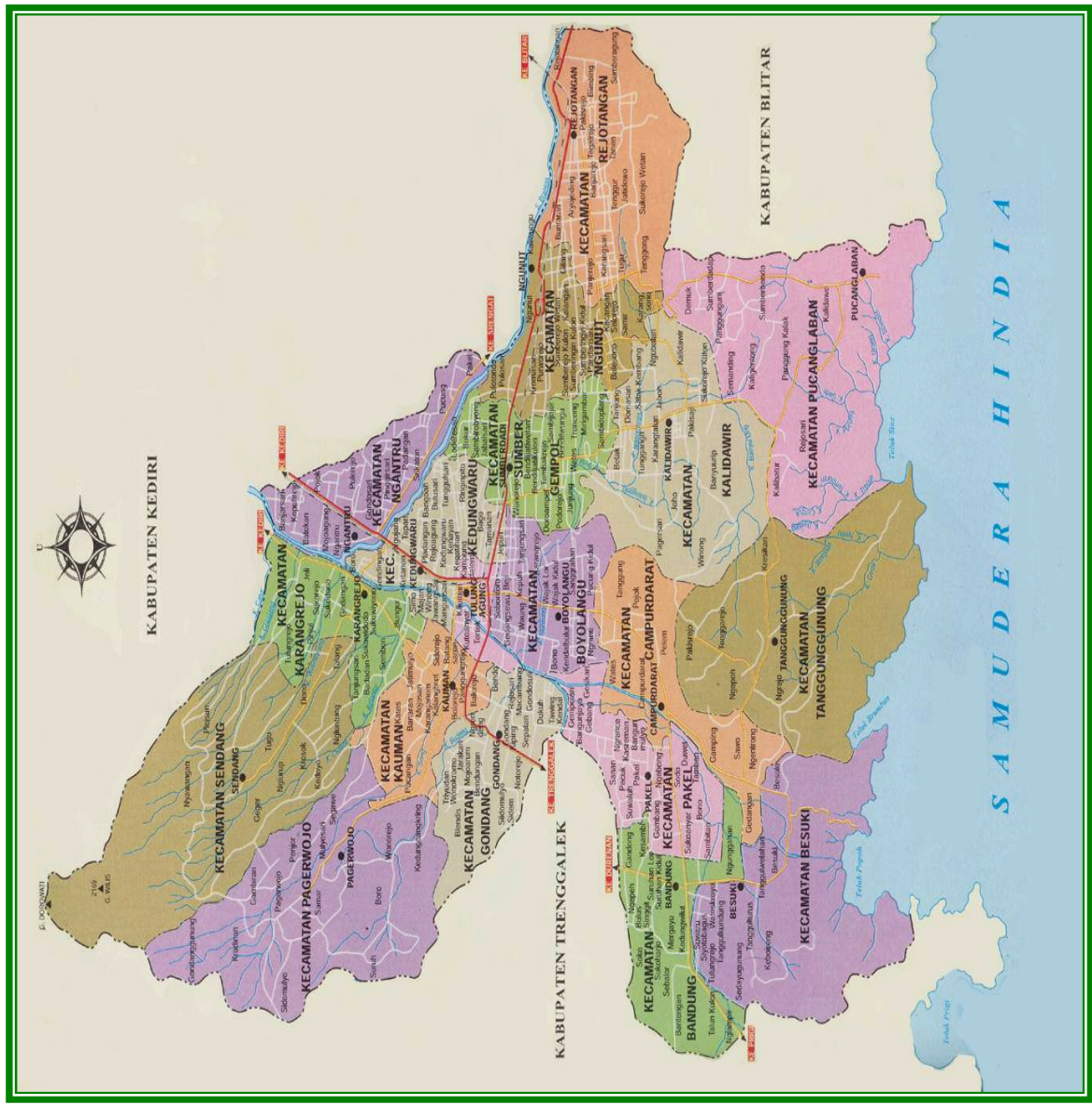
Sumber : BPS: Kabupaten Blitar Dalam Angka, 2004 : 62

Jika diasumsikan seluruh angkatan kerja yang tercatat sedang mencari pekerjaan tersebut di atas sudah memperoleh pekerjaan, maka data dalam Tabel 4.5 ini akan menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki, maka TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) perempuan, selalu nampak lebih tinggi dari tahun ke tahun. Persoalannya, apakah TPAK perempuan tersebut ada hubungannya dengan kian banyaknya kaum Ibu

rumah tangga di daerah ini yang bekerja sebagai TKW ke luar negeri, masih membutuhkan dukungan bukti lebih lanjut.

#### 4.5.Deskripsi Umum Daerah Penelitian Kabupaten Tulungagung

Gambar : 4.4. Peta Kabupaten Tulungagung.



Sumber : A.Chaldun, 2004. Atlas Jawa Timur PT.Karya Pembina Swajaya



#### 4.5.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111' 43' sampai dengan 112' 07' bujur timur, dan 7' 51 ' sampai dengan 8' 18' lintang selatan. Sebagai kawasan di bagian selatan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65 km dengan topografi bukit kapur di bagian selatan yang sebagian besar relatif tandus, berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan perbukitan di bagian utara yang relatif lebih subur. Daerah-daerah yang subur dengan pengairan yang baik terdapat di bagian utara, tengah dan di bagian timur (Kecamatan Gondang, Sumbergempol, Ngantru, Ngunut, Kauman dan Kedungwaru) sedangkan daerah-daerah bagian selatan meliputi Kecamatan Kalidawir, Campur Darat, Besuki, Tanggunggunung, Pakel dan Bandung sebagian besar merupakan daerah pegunungan kapur selatan yang relatif kurang subur.

Curah hujan, menurut data tahun 2004, tertinggi pada bulan Maret dan Oktober mencapai 598 mm untuk Kecamatan-kecamatan Ngantru, Sendang, Pagerwojo dan Karangrejo, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan-bulan Juli, Agustus dan September yaitu hanya mencapai 5 - 115 mm; bahkan untuk wilayah selatan sama sekali tidak ada hujan pada bulan-bulan tersebut (BPS: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2005 :12-13).

Kabupaten Tulungagung terbagi ke dalam 19 Kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan; dengan 1.830 RW dan 6.239 RT. Berdasarkan Instruksi

Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1996 tentang Juklak Kepmendagri 25 Tahun 1996, klasifikasi desa/kelurahan di Kabupaten ini sudah berada pada tingkat swadaya sebanyak 144 desa/kelurahan dan tingkat swakarsa sebanyak 127 desa/kelurahan. Secara administratif Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar disebelah timur, disebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri, disebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Trenggalek dan disebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

#### **4.5.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan**

Berdasarkan data hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2005, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 984.730 jiwa; terdiri dari 488.429 penduduk laki-laki, dan 496.301 penduduk perempuan, dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 870,16 orang per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,45 persen pada tahun 2001-2002, sedang pada tahun 2003-2004, terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,83 persen rata-rata setiap tahunnya (BPS: Tulungagung Dalam Angka, 2005 : 45).

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, maka jelas Kecamatan Tulungagung (kota) dan kecamatan Kedungwaru yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten

Tulungagung merupakan daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi, yakni masing-masing mencapai 4.854,28 orang per km<sup>2</sup> (Kecamatan Tulungagung) dan 2.583,69 orang per km<sup>2</sup> (Kedungwaru). Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah adalah kecamatan Tanggunggunung yakni sebesar 202,91 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan lain yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di bawah 500 orang per km; terdapat di kecamatan-kecamatan; Pucanglaban dengan 284,49 orang per km; kecamatan Pagerwojo dengan 333,60 orang per km; kemudian kecamatan Besuki dengan 413,67 orang per km; dan kecamatan Sendang dengan 447,54 orang per km.

Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk di bawah 500 orang per km<sup>2</sup>, sebagian besar merupakan daerah pegunungan (bukit) tandus di bagian utara seperti di kecamatan Sendang dan Pagerwojo yang menghadapi dilema air untuk irigasi. Di sebagian besar wilayah kecamatan ini, pada musim penghujan menghadapi ancaman tanah longsor karena curah hujan yang tinggi, tetapi sebaliknya pada saat musim kemarau tiba, wilayah kecamatan ini mengalami kekeringan yang parah, karena sebagian besar bukitnya sudah gundul. Di bagian selatan yang merupakan pegunungan kapur selatan, juga mengalami dilema serupa. Jika musim penghujan tiba, sebagian daerah ini banjir, tetapi ketika musim kemarau tiba, daerah ini menjadi sangat gersang dan berdebu.

Gambaran mengenai distribusi penduduk Kabupaten Tulungagung per Kecamatan dan tingkat kepadatannya, dapat dilihat dari data sebagaimana disajikan di dalam Tabel 4.6 di halaman berikut.

**Tabel 4.6**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk
1. Besuki	82,16	33.987	413, 67
2. Bandung	41,96	46.604	1.110, 68
3. Pakel	36,06	48.861	1.354, 99
4. Campurdarat	39,56	50.205	1.269, 08
5. Tanggunggunung	111,73	23.889	202, 91
6. Pucanglaban	82,94	23.596	284, 49
7. Kalidawir	97,81	66.667	681, 60
8. Rejotangan	66,49	69.734	1.048, 79
9. Ngunut	37,70	71.036	1.884, 24
10. Sumbergempol	39,28	61.285	1.560, 21
11. Boyolangu	38,44	69.700	1.813, 22
12. Gondang	44,02	54.477	1.237, 55
13. Kauman	30,84	49.528	1.605, 97
14. Tulungagung	13,67	66.358	4.854, 28
15. Kedungwaru	29,74	76.839	2.583, 69
16. Ngantru	37,03	48.601	1.312, 48
17. Karangrejo	35,54	38.220	1.075, 41
18. S e n d a n g	96,46	43.170	447, 54
19. Pagerwojo	88,22	29.430	333, 60
Jumlah : th. 2001	1.055.65	972.187	920, 94

Sumber : BPS ; Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2005 :45.

#### 4.5.3. Agama dan Mata Pencaharian Penduduk

Seperti kebanyakan daerah pesisir di Jawa Timur, penduduk di Kabupaten Tulungagung ini juga mayoritas menganut Agama Islam yakni sekitar 98,32%. Penduduk yang menganut agama Kristen tercatat 1,02%; Katholik 0,42%, Budha 0,17% dan penganut Hindu tercatat sebanyak 0,07% saja. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tulungagung, masih sebagian besar menekuni bidang pertanian, disusul kemudian oleh bidang

perkebunan, industri, dan jasa perdagangan. Data yang rinci mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di setiap sektor kegiatan ekonomi tidak tersedia; tetapi secara garis besar, dapat digambarkan bahwa, sektor pertanian (mulai dari tanaman pangan, perikanan, dan peternakan) masih merupakan sektor yang dominan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten ini justru tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan sumbangan sektor perdagangan, dan industri pengolahan. Pada tahun 2003 tercatat kenaikan PDRB sebesar 12,96% dibandingkan tahun 2002; dan kontribusi terbesar diperoleh dari sektor perdagangan (25,36%), disusul kemudian oleh sektor industri pengolahan (20,82%), dan sektor pertanian sebesar 20,50% (BPS: Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, 2005 : 303).

#### **4.5.4. Angkatan Kerja**

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2005, dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah angkatan kerja selama periode tahun 2000-2004, menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Angkatan kerja yang berpendidikan SD mengalami penurunan jumlah secara absolut dari 5.935 orang pada tahun 2000 menjadi 2.930 pada tahun 2003, atau terjadi penurunan sebesar 11,40%.
- 2) Angkatan kerja yang berpendidikan SMTP, juga mengalami penurunan secara absolut dari 2.960 orang pada tahun 2000; menjadi 2.395 orang pada tahun 2003, atau terjadi penurunan sebesar 6,29%.
- 3) Angkatan kerja yang berpendidikan SMTA, semula berjumlah 2.764 orang pada tahun 2000, juga mengalami penurunan menjadi 1.897 orang pada tahun 2003, atau menurun sekitar 33,33%.
- 4) Angkatan kerja yang berpendidikan Diploma 3 yang semula pada tahun 2000 berjumlah 149 juga mengalami penurunan menjadi 89 orang saja pada tahun 2003, atau turun sebesar 23,81%.
- 5) Angkatan kerja yang berpendidikan sarjana (S-1) yang semula berjumlah 814 pada tahun 2000, mengalami penurunan menjadi 101 orang saja tahun 2003 atau telah turun sekitar 21,01%.

**Tabel 4.7**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	2000	2001	2002	2003	Penurunan rata2
1. Sekolah Dasar	5.935	2.520	5.407	2.930	11,40 %
2. SMTP	2.960	1.991	3.283	2.359	6,29 %
3. SMTA	2.764	2.581	2.027	1.897	33,33 %
4. Diploma 3	149	161	96	89	23,81 %
5. Sarjana (S-1)	814	1.023	548	101	21,01 %
Jumlah	12.622	8.276	11.361	7.376	15,16 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2004.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang sudah disalurkan, menurut lapangan pekerjaan dari tahun 1999 hingga tahun 2003, yang tertinggi adalah lapangan kerja di sektor pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan, yakni sebanyak 7.001 orang pada tahun 1999. Tetapi tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan drastis menjadi 2.663 pada tahun 2000; pada tahun 2002 naik menjadi 2.708, dan turun lagi menjadi 2.427 orang saja pada tahun 2003. Urutan berikutnya adalah lapangan kerja di sektor jasa kemasyarakatan. Pada pasca krisis ekonomi yaitu tahun 1999; telah disalurkan sebanyak 4.675 orang tenaga kerja di sektor ini, kemudian pada tahun 2000 naik menjadi 5.776 orang, tetapi tahun berikutnya 2001 turun lagi menjadi 4.138 orang, dan naik lagi pada tahun 2002 menjadi 5.803 orang kemudian turun lagi tahun 2003 menjadi 3.228 orang saja (Tabel. 4.8).

**Tabel 4.8**  
**Angkatan Kerja yang Disalurkan Menurut**  
**Lapangan Pekerjaan 1999 - 2003**

Lapangan Pekerjaan	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan	7.001	2.663	1.327	2.708	2.427
2. Pertambangan dan Penggalian	--	--	--	--	--
3. Industri Pengolahan	1.352	458	771	654	158
4. Listrik, Gas dan Air	--	36	26	--	142
5. Bangunan/Konstruksi	56	24	33	7	--
6. Perdagangan, Hotel, Rm makan	349	202	203	296	--
7. Transportasi/Pergudangan	152	127	54	111	--
8. Jasa Kemasyarakatan	4.675	5.776	4.138	5.803	3.228
Jumlah	13.585	9.286	6.552	9.598	5.955

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2004.

Selanjutnya, angkatan kerja yang telah disalurkan menurut tingkat pendidikan sejak tahun 1999 hingga 2003 adalah sebagai berikut. Angkatan kerja yang berpendidikan SD menempati jumlah terbesar yang telah disalurkan ke beberapa lapangan pekerjaan. Tahun 1999 ada 9.585 orang lulusan SD yang disalurkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Tahun 2000 jumlah tersebut menurun menjadi 5.577 orang; tahun 2001 turun lagi menjadi 2.879 orang, tetapi tahun 2002 naik lagi menjadi 5.248 orang sebelum turun lagi pada 2003 menjadi 2.958 orang saja. Lulusan SLTP yang telah disalurkan ke beberapa lapangan pekerjaan menempati urutan kedua sebesar 12.350 orang selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 1999-2003. Lulusan SLTA, yang telah disalurkan selama kurun waktu tersebut mencapai 6.171 orang; sedangkan lulusan Diploma dan Sarjana S-1; yang telah disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan, masing-masing sebesar 40 orang dan 198 orang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2004 : 62).

Disamping penyaluran tenaga kerja ke berbagai sektor kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak 1999 yang lalu, juga telah menyalurkan sejumlah tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL); Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan



Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Secara rinci jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui AKL, AKAD dan AKAN tersebut sebagai berikut.

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL) sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 mencapai 3.986 orang; jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 ada sebanyak 17.633 orang; sedangkan jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui Antar Kerja Antar Negara sejak periode tahun tersebut ada sebanyak 29.317 orang. Dibandingkan dengan penyaluran tenaga kerja melalui AKL dan AKAD, nampak jelas bahwa, penyaluran tenaga kerja melalui AKAN (ke luar negeri) khususnya sebagai TKI justru paling besar jumlahnya selama kurun waktu lima tahun terakhir.

#### **4.6.Deskrpsi Temuan Penelitian**

##### **4.6.1.Karakteristik Demografi Responden**

Sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab metode penelitian, responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini, untuk TKW legal ternyata sebagian besar adalah wanita usia muda. Gambaran tentang usia responden yang dikategorikan sebagai TKW legal dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden TKW Legal Menurut Umur**

Umur Responden	Jumlah	Persentase
15 – 19 tahun	52	35,00
20 – 24 tahun	67	44,00
25 – 29 tahun	22	15,00
30 – 34 tahun	6	4,00
35 – 39 tahun	1	0,00
> 40 tahun	2	2,00
<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data primer diolah.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah responden yang termasuk dalam kelompok umur 15 – 19 tahun ada sebanyak 35,0% (52 orang), kemudian kelompok umur 20 -24 tahun ada sebanyak 44,0% (67 orang), dan kelompok umur 25 – 29 tahun ada sebanyak 15,0% (22 orang). Sementara itu, untuk responden kelompok umur 30-34 tahun ada sebanyak 4,0% (6 orang) sedangkan untuk kelompok umur 35 hingga di atas 40 tahun hanya sekitar 2,0% atau sebanyak 3 orang saja. Selanjutnya, jika diasumsikan bahwa usia 19 tahun hingga 29 tahun adalah kelompok umur muda, maka hasil ini dapat dijadikan suatu indikasi awal bahwa, ternyata para wanita yang bekerja secara legal ke luar negeri sebagian besar (94,0%) terdiri dari wanita-wanita usia muda yakni mereka yang berumur antara 19-29 tahun (Tabel 4.9).

Sementara itu, responden kategori TKW Ilegal yang berhasil ditemukan dan diwawancarai dalam penelitian ini, menunjukkan kenyataan bahwa, sebagian besar umur mereka relatif lebih tua, jika dibandingkan

dengan responden kategori TKW Legal. Data dalam Tabel 4.10 berikut ini menunjukkan bahwa, sebanyak 85,0% (TKW Ilegal) usianya sebagian besar 30 tahun ke atas, tepatnya antara 30-39 tahun, yakni sebanyak 128 orang TKW.

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden TKW Ilegal Menurut Umur**

Umur Responden	Jumlah	Persentase
20 – 24 tahun	7	5,0
25 – 29 tahun	6	4,0
30 – 34 tahun	60	40,0
35 – 39 tahun	68	45,0
40 – 44 tahun	6	4,0
45 – 49 tahun	3	2,0
<b>Jumlah</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Data primer diolah.

Jumlah responden TKW Ilegal yang termasuk ke dalam kelompok umur kurang dari 19 tahun bahkan tidak ada, sedangkan kelompok umur paling muda mulai dari kelompok umur 20-24 tahun yakni sebanyak 5,0% (7 orang), kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 4,0% (6 orang). Adapun jumlah TKW ilegal kelompok umur 30-34 tahun, dan kelompok umur 35-39 tahun masing-masing mencapai jumlah 40,0% dan 45 % atau sebanyak 60 dan 68 orang . Responden TKW Ilegal yang berada pada kelompok umur 40 tahun ke atas juga hanya 6,0% atau sebanyak 9 orang saja (Tabel 4.10). Jika diasumsikan kelompok usia 30 - 44 tahun sebagai kategori umur tua, maka akan ada 89 % TKW ilegal yang termasuk dalam kategori umur tua.

#### 4.6.2. Status Perkawinan Responden

Berdasarkan status perkawinan responden sebelum bermigrasi, ditemukan bahwa untuk responden TKW Legal, nampak sebagian besar (61,0%) belum menikah, sedangkan persentase mereka yang sudah menikah ada sebanyak 33,0%; dan sisanya TKW kategori Legal dengan status cerai (dalam keadaan sedang berpisah) ada sebanyak 3,0% dan mereka yang berstatus janda (ditinggal mati oleh suaminya) juga ada sebanyak 3,0%. Data selengkapnya tentang temuan hasil penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.11.

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Responden TKW Legal Menurut Status Perkawinan**

Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
Belum Kawin	91	61,00
Kawin	50	33,00
Cerai (hidup berpisah)	5	3,00
Janda (suami meninggal)	4	3,00
Jumlah	150	100,00

Sumber : Data primer diolah.

Ketika kembali ke desa asal yakni pada saat wawancara berlangsung jumlah TKW Legal yang berstatus cerai bertambah 3 orang, menjadi 8 orang. Ada berbagai alasan mereka bercerai, diantaranya adalah; karena terlalu lama berpisah, istri merasa tidak cocok lagi dengan suami, dan alasan lain; istri punya pria idaman lain. Dalam wawancara nampak jelas bahwa ada sebagian responden yang tidak menyebut dirinya janda karena nampaknya

mereka baru saja berpisah, dan menekankan pada proses bercerai, tetapi sebagian lagi menekankan pada hasil akhir dari perceraian itu, yaitu berpisah karena ditinggal mati oleh suaminya dan oleh karenanya menjadi janda.

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Responden TKW Ilegal Menurut Status Perkawinan**

Status Perkawinan	Jumlah	Persentase
Belum Kawin	36	24,00
Kawin	99	66,00
Cerai ( hidup berpisah)	7	5,00
Janda.(suami meninggal)	8	5,00
Jumlah	150	100,00

Sumber : Data primer diolah.

Agak berbeda dengan responden TKW Legal, untuk responden TKW Ilegal, justru sebagian terbesar di antaranya sudah berstatus kawin saat pertama kali bekerja ke luar negeri, seperti ditunjukkan oleh data dalam Tabel 4.12. Persentase TKW Ilegal yang berstatus kawin ketika menjadi TKI pertama kali ke luar negeri ada sebesar 66,0% (99 orang); sedangkan yang berstatus belum kawin, ada sebesar 24,0% (36 orang TKW). Sisanya, mereka yang mengaku cerai dan janda masing-masing ada sebanyak 5,0%.

Perbedaan karakteristik antara responden TKW Legal dan TKW Ilegal sebagaimana temuan studi ini, nampaknya sangat mudah dipahami, karena TKW Legal yang sebagian besar berusia muda ketika pertama kali berangkat menjadi TKW ke luar negeri, terdiri dari wanita-wanita yang belum menikah,

sementara TKW Ilegal yang usianya lebih tua, ketika berangkat ke luar negeri memang sebagian besar mereka sudah menikah di daerah asalnya. Keadaan tersebut berubah setelah mereka kembali ke daerah asalnya. Pada saat wawancara berlangsung, ada 3 orang TKW Ilegal yang sedang dalam proses perceraian, sehingga jumlah mereka yang berstatus cerai bertambah menjadi 10 orang, kebanyakan dengan alasan merasa tidak cocok lagi dengan suami.

#### 4.6.3. Tingkat Pendidikan Responden

Dalam banyak hal, tingkat pendidikan seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia, seperti nampak pada pengukuran *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dilihat dari data dalam Tabel 4.13 berikut ini.

**Tabel 4.13**  
**Distribusi TKW Legal Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sekolah Dasar/MTs	10	7,00
SLTP/ sederajat	43	29,00
SLTA/ sederajat	91	61,00
Diploma 1	3	2,00
Diploma 2	2	1,00
Diploma 3	1	1,00
Jumlah	150	100,00

Sumber : Data primer diolah, Mei 2005

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa untuk responden TKW Legal lebih dari setengah responden (61,0%) ternyata berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Lanjutan, baik SLTA umum maupun SLTA Kejuruan, sedangkan sebagian lagi berpendidikan SLTP yakni sebesar 29,0%. Sisanya adalah mereka yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar ada sebesar 7,0% Hanya sedikit sekali diantara TKW Legal ini yang berpendidikan Diploma 1, 2 dan 3. Data dalam Tabel 4.13, menunjukkan hanya 2,0% saja yang berpendidikan Diploma 1, sedangkan lainnya yang berpendidikan Diploma 2 dan 3 masing-masing hanya 1,0%. Kenyataan ini nampaknya sesuai dengan umur responden TKW Legal yang sebagian besar terdiri dari wanita-wanita umur muda.

**Tabel 4.14**  
**Distribusi TKW Ilegal Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sekolah Dasar/MTs	120	80,00
SLTP/sederajat	3	2,00
SLTA/sederajat	20	13,00
Madrasah Aliah	7	5,00
Jumlah	150	100,00

Sumber: Data Primer, diolah.

Tetapi tidak demikian halnya dengan responden TKW Ilegal. Kendatipun sebagian besar responden kelompok ini umurnya lebih tua,

namun dilihat dari tingkat pendidikannya justru sebaliknya. Bahkan data dalam Tabel 4.14, menunjukkan sedikit keunikan. Seperti yang terbaca dalam Tabel, bahwa tingkat pendidikan kelompok responden TKW Ilegal tidak menunjukkan pola yang linier. Sebagian terbesar (80,0%) responden berpendidikan Sekolah Dasar (atau sederajat), sedangkan mereka yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat, hanyalah 2,0% saja ; tetapi yang menarik adalah, persentase mereka yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Mengah Atas atau yang sederajat, justru lebih tinggi yakni mencapai 18,0%, dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan SLTP (Tabel 4.15).

#### **4.6.4. Pemilikan Lahan Pertanian**

Sebelum para TKW ini (baik legal maupun ilegal) bekerja di luar negeri, perlu diketahui adanya deskripsi yang lebih jelas tentang kondisi sosial-ekonomi keluarganya, yang dalam studi ini diduga dapat menjadi salah satu determinan bagi proses migrasi seorang TKW. Sebagaimana telah disinggung di dalam latar belakang penelitian ini, bahwa kondisi kemiskinan sebagian penduduk pedesaan selama ini (dalam banyak kasus); telah terbukti menjadi determinan migrasi antar daerah maupun antar negara. Akan tetapi untuk mengukur kemiskinan secara empirik di lapangan, ternyata tidaklah mudah. Oleh karena itu, penelitian ini sengaja tidak memilih variabel



kemiskinan sebagai determinan migrasi (meskipun dalam banyak studi sudah terbukti), tetapi menggunakan variabel “faktor produksi” yaitu luas pemilikan tanah yang dikuasai oleh TKW dan keluarganya. Dalam konteks yang lebih luas, disparitas antar regional itulah sesungguhnya yang menjadi pendorong dan penarik arus migrasi penduduk.

Mengingat bahwa, secara sosiologik tidak ada perbedaan yang prinsipil antara masyarakat desa dengan masyarakat petani, maka membicarakan masyarakat desa berarti juga membicarakan masyarakat petani. Dalam studi ini, luas lahan pertanian yang dimiliki dan dikuasai oleh para petani (sebagai sumber utama produksi) diasumsikan sebagai indikator dari kondisi sosial-ekonomi penduduk di pedesaan Jawa Timur.

Deskripsi responden TKW kategori legal dan juga ilegal, menurut luas pemilikan lahan pertanian yang benar-benar dikuasai oleh keluarga di desa asalnya, sebelum mereka menjadi TKW untuk pertama kali ke luar negeri dapat disajikan dalam Tabel 4.15 berikut ini.

**Tabel 4.15**  
**Distribusi Responden TKW Legal/Ilegal Menurut Pemilikan Lahan**

Luas Pemilikan lahan Pertanian (m <sup>2</sup> )	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
Tidak Punya	112	75,00	126	84,00	238	79,33
200 – 1.500	4	2,50	--	--	4	1,30
1.501 – 2.800	7	5,00	5	3,00	12	4,00
2.801 – 4.100	10	7,00	13	9,00	23	7,60
4.101 – 5.400	6	4,00	5	3,00	11	3,60
5.401 – 6.700	8	5,00	1	1,00	9	3,00
6.701 – 8.000	3	1,50	--	--	3	1,00
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,00

Sumber : Data Primer, diolah.

Dari 150 responden TKW Legal dalam studi ini, ternyata sebagian terbesar (75,0%) mengaku bahwa keluarganya tidak memiliki lahan pertanian sebelum berangkat menjadi TKW ke luar negeri. Sisanya ada 7,50% yang mengaku memiliki lahan pertanian antara 200 hingga 2.800 m<sup>2</sup> ; kemudian sebanyak 7,0 % mengaku memiliki lahan pertanian antara 2.801 hingga 4.100 m<sup>2</sup>; kemudian 9.0% lainnya mengaku memiliki lahan pertanian antara 4.101 hingga 6.700 m<sup>2</sup>. Hanya 1,50% TKW Legal yang memiliki lahan pertanian di atas 6.701 hingga 8.000 m<sup>2</sup>.

Berbeda dengan kelompok TKW Legal, kelompok TKW Ilegal, lebih banyak yang mengaku tidak memiliki lahan pertanian (84,0 %) sebelum berangkat menjadi TKW ke luar negeri.

Membandingkan data dalam Tabel tersebut di atas , ada tiga hal yang dapat dikritisi sebagai berikut. *Pertama*, melihat satuan ukuran luas lahan yang disebutkan oleh responden bukan lagi menggunakan standard baku untuk satuan luas tanah yaitu hektar, tetapi sudah turun ke satuan meter persegi. *Kedua*, persentase responden TKW legal dibanding ilegal yang mengaku tidak bertanah di pedesaan, perbedaannya cukup besar yakni mendekati 10,0%. Oleh karena itu, secara kasar dari luas pemilikan lahan pertanian ini dapat dinyatakan bahwa, ada perbedaan kondisi sosial-ekonomi antara kelompok TKW Legal dengan kelompok TKW Ilegal. Artinya; TKW Legal lebih baik kondisi sosial-ekonominya bila dibandingkan dengan kelompok TKW Ilegal. *Ketiga*, bila dilihat dari ukuran satuan luas lahan (m<sup>2</sup> dan bukan hektar) yang disebutkan oleh para responden dalam penelitian ini, maka muncul pertanyaan bahwa, apakah distribusi dan luas pemilikan lahan pertanian di pedesaan dewasa ini, sudah sedemikian kritis dan mengkhawatirkan ?, jawabannya hanya bisa ditemukan lewat penelitian.

#### **4.6.5.Pendapatan Responden Di Desa Asal**

Pendapatan responden atau keluarganya rata-rata per bulan di daerah asal untuk kelompok TKW Legal, nampak mayoritas di antaranya (64,0%) memiliki tingkat pendapatan antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000,- Sisanya, ada sekitar 25,0% responden TKW kelompok ini yang memiliki

pendapatan keluarga di desa asalnya (sebelum bekerja menjadi TKW di luar negeri), antara Rp.151.000,- sampai Rp.200.000,- Mereka yang memiliki tingkat pendapatan di atas Rp. 200.000,- persentasenya sangat kecil.

**Tabel 4.16**  
**Distribusi Responden TKW Legal Menurut Pendapatan di Daerah Asal**

Pendapatan (Rp)	Jumlah	Persentase
100.000 – 150.000,-	96	64,00
151.000 – 200.000,-	36	25,00
201.000 – 250.000,-	11	7,00
251.000 – 300.000,-	2	1,00
301.000 – 350.000,-	2	1,00
> 351.000,-	3	2,00
Jumlah	150	100,00

Sumber: Data Primer, diolah.

Sementara itu, untuk kelompok TKW Ilegal, nampak lebih bervariasi. Responden yang mengaku memiliki pendapatan keluarga rata-rata per bulan antara Rp.50.000,- hingga Rp. 100.000,- ada sebanyak 33,0%; sementara mereka yang mengaku memiliki pendapatan keluarga di atas Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000,- per bulan ada sebanyak 45,0%; dan demikian seterusnya, semakin besar tingkat pendapatan, semakin kecil persentase responden yang mengaku memiliki pendapatan keluarga untuk kategori tersebut (Tabel 4.17).

**Tabel 4.17**  
**Distribusi Responden TKW Ilegal Menurut Pendapatan di Daerah Asal**

Pendapatan (Rp)	Jumlah	Persentase
50.000 – 100.000,-	50	33,00
101.000 – 150.000,-	67	45,00
151.000 – 200.000,-	18	12,00
201.000 – 250.000,-	7	5,00
251.000 – 300.000,-	6	4,00
> 301.000,-	3	1,00
Jumlah	150	100,00

Sumber: Data Primer, diolah.

Dari perbandingan secara kasar, data dalam Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 di atas, sebenarnya dapat dinyatakan bahwa, dalam hal penghasilan keluarga responden di desa asal (sebelum mereka bekerja sebagai TKW di luar negeri) keluarga TKW Legal nampak relatif lebih tinggi tingkat penghasilannya bila dibandingkan dengan tingkat penghasilan keluarga TKW dari kelompok Ilegal. Mayoritas keluarga TKW Legal (64,0 %) memiliki penghasilan antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000,- sementara pada keluarga TKW Ilegal hanya sebesar 45,0% yang memiliki penghasilan untuk kategori tersebut.

#### **4.6.6. Perolehan Pekerjaan di Desa Asal**

Sulitnya responden mendapatkan salah satu jenis pekerjaan di daerah asalnya, juga ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong mereka, untuk memutuskan bermigrasi ke luar negeri menjadi TKW, baik dengan cara legal

maupun ilegal. Data dalam Tabel 4.18 nampak bahwa, untuk kelompok responden TKW Legal 68,5% diantaranya mengaku sudah bekerja sebelum berangkat menjadi TKW di luar negeri. Sisanya sebesar 31,5% mengaku tidak bekerja masih ikut orang tua, atau hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

**Tabel 4.18**

**Distribusi Responden TKW Legal/Ilegal Menurut Pekerjaan di Desa Asal**

Jenis PekerjaanTKW Di desa asal	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
1. Tidak kerja	47	31,5	147	98,0	194	64,7
2. Buruh Indst	77	51,3	3	2,0	80	26,7
3. Jasa Pelayanan	26	17,2	--	--	26	8,6
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,0

Sumber : Data Primer, diolah.

Tidak demikian halnya dengan kelompok responden TKW Ilegal. Sulitnya memperoleh pekerjaan di desa asalnya diakui oleh sebagian besar responden kategori ini. Data dalam Tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa, sebanyak 147 orang atau hampir seluruh responden (98,0%) mengaku tidak bekerja sebelum menjadi TKW. Mereka hanya mengaku sebagai ibu rumah tangga, meskipun dalam kenyataannya, cukup banyak diantaranya yang turut membantu mencari tambahan penghasilan suami dengan cara bekerja serabutan pada saat hari *pasar*an (bahasa Jawa) di pasar tradisional setempat.

Sisanya hanya sekitar 2,0% saja yang secara terbuka mengaku masih punya pekerjaan sebagai buruh industri garmen (Tabel 4.18).

#### 4.6.7. Dorongan Keluarga di Desa Asal

Dorongan dari keluarga kepada responden untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui migrasi ke luar negeri (menjadi TKW), nampak cukup besar baik untuk kelompok responden TKW Legal maupun untuk kelompok responden TKW Ilegal. Data dalam Tabel 4.19 berikut ini menunjukkan kenyataan tersebut.

**Tabel 4.19**  
**Distribusi Responden TKW Legal/Ilegal Menurut Dorongan Keluarga**

Pihak yang Beri Dorongan Ke LN	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
1. Tidak ada	7	4,7	3	2,0	10	3,0
2. Suami	29	19,3	8	5,3	37	12,0
3. Orang tua	35	23,3	15	10,0	50	17,0
4. Saudara	61	40,7	103	68,7	164	55,0
5. lainnya	18	12,0	21	14,0	39	13,0
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,0

Sumber : Data Primer, diolah.

Nampak jelas bahwa, dorongan keluarga sangat besar kepada para responden untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia baik untuk kelompok responden TKW Legal maupun untuk responden TKW Ilegal. Hal itu nampak dari persentase dorongan keluarga kepada responden

TKW Legal dan Ilegal masing-masing sebesar 83,0% dan 84,0%. Keluarga dalam hal ini meliputi, suami, orang tua dan Saudara. Sementara itu, kategori tidak ada, maksudnya adalah untuk menunjukkan responden yang berangkat ke luar negeri atas jaminan teman atau PL (Petugas Lapangan PJTKI), meskipun orang tua atau keluarga lainnya kurang setuju. Kategori lainnya; adalah dorongan yang berasal dari orang-orang di luar keluarga responden, seperti calon suami, atau pacar dan sahabat karib.

Akan tetapi jika kategori legal/ilegal dalam tabel 4.19 di atas dihilangkan, maka sebenarnya dorongan yang paling besar bagi ke dua kategori TKW ini untuk bekerja di luar negeri, justru berasal dari Saudaranya yakni sebesar 55,0%

#### **4.6.8.Lingkungan TKW di Desa Asal**

Lingkungan TKW yang dimaksud adalah menunjuk kepada sukses migran lama yakni TKW yang sudah lebih dahulu bekerja di luar negeri. Indikator yang digunakan dalam studi ini adalah ukuran materi atau kepemilikan barang-barang tertentu, yang nampak secara kasat mata seperti; kemampuan membangun rumah baru yang jauh di atas rata-rata kualitas rumah orang desa pada umumnya, pemilikan barang-barang elektronik (TV, VCD, *radio/ cassette, Sound system*, Kulkas, *hand phone*, dll) serta kendaraan bermotor roda empat dan terutama sepeda motor baru.



Lingkungan TKW, yaitu sukses migran lama yang diukur secara materiil dari orang-orang terdekat responden yang kemudian menjadi faktor pendorong (referensi) bagi yang bersangkutan untuk berusaha dapat meraih sukses yang sama dengan Tetangga, Saudara dan Kerabat dekat di daerah asalnya. Tabel 4.20, menunjukkan bahwa, faktor pendorong dari lingkungan ini terhadap TKW Legal ada sebesar 70,7% sedangkan untuk TKW Ilegal, faktor tersebut mencapai 99,3%.

**Tabel 4.20**  
**Distribusi TKW Legal/Ilegal Menurut Pengaruh Lingkungan**

Pengaruh Lingkungan TKW	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
1. Teman sedesa	1	0,7	1	0,7	2	1,0
2. Tetangga dkt	1	0,7	34	22,7	35	12,0
3. Saudara	43	28,7	71	47,3	114	38,0
4. Kerabat dkt	63	42,0	44	29,3	107	35,0
5. lainnya (PL)	42	28,0	-	-	42	14,0
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,0

Sumber : Data Primer, diolah.

Untuk kategori PL (Petugas Lapangan) dalam Tabel 4.20, dapat dijelaskan bahwa, bagi kelompok responden TKW Legal, sukses migran lama yang kemudian menjadi PL (Petugas Lapangan) dan merekrut TKW untuk salah satu Jasa PJTKI resmi, telah menjadi faktor pendorong dan juga referensi bagi sebagian kecil wanita muda ini (28,0%) untuk meraih sukses yang sama di luar negeri.

#### 4.6.9. Peranan Jaringan Migrasi

Jaringan migrasi sebagaimana dikonsepsikan dalam penelitian ini adalah individu atau lembaga yang memberikan fasilitas (baik sebagian atau keseluruhan) serta kemudahan bagi para calon migran (TKW) didalam proses migrasi ke luar negeri, sampai yang bersangkutan mendapatkan majikan dan pekerjaan di luar negeri. Besar kecilnya peran jaringan migrasi TKW ini di daerah asal, dapat dilihat dalam Tabel 4.21. Nampak bahwa, untuk kelompok responden TKW Legal, peranan Petugas Lapangan dari Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja resmi (PJTKI yang memiliki SIUP dari Direktorat Jenderal PPTKLN-Depnakertrans-RI ) sangat dominan, bila dibandingkan dengan peranan Petugas Lapangan non PJTKI resmi untuk kelompok responden TKW Ilegal.

Meskipun demikian, ada sekitar 24,7% kelompok responden TKW Legal, yang menggunakan jasa Perantara tidak resmi, tetapi mereka memiliki jaringan kerja dengan *Agent* Penyalur resmi di luar negeri. Sebaliknya, untuk kelompok responden TKW Ilegal, mayoritas (88,7%) di antaranya memang menggunakan jasa *Teikong* (Calo tenaga kerja) dan PL tidak resmi, sedangkan sisanya (11,3%) adalah TKW Ilegal yang menyusul suami dan atau saudaranya yang sudah lebih dahulu bekerja di luar negeri dan dalam hal ini kebanyakan ke Malaysia dan Brunai Darussalam.

**Tabel 4.21**  
**Distribusi TKW Legal/Ilegal Menurut Peran Jaringan Migrasi**

Peran Jaringan Migrasi TKW	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
1. Teikong	1	1,0	4	2,7	5	2,0
2. PL tak resmi	37	24,7	129	86,0	166	55,0
3. PL PJTKI*	112	74,3	--	--	112	37,0
4. Lainnya	--	--	17	11,3	17	6,0
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,0

Sumber : Data Primer, diolah.

Keterangan : \* PJTKI resmi

#### 4.6.10.Keputusan Bermigrasi

Berkaitan dengan pihak-pihak yang turut memberikan pertimbangan dan kemudian memutuskan untuk berangkat (menjadi TKW) ataukah tidak, dan dengan cara bagaimana harus berangkat ke luar negeri (legal atau ilegal) data dalam Tabel 4. 22 memberikan gambaran sebagai berikut. Untuk kelompok responden TKW Legal, mayoritas lebih (54,7%) di antaranya mengaku berangkat ke luar negeri menjadi TKW dengan keputusan sendiri. Adapun sisanya, sebesar 44,7% mengaku keputusan berangkat ke luar negeri diambil bersama orang tua responden. Dipihak lain, untuk kelompok responden TKW Ilegal, yang memutuskan sendiri tanpa pengaruh orang lain, juga menunjukkan persentase tertinggi (45,3% Tabel 4.23) Temuan ini menjadi menarik dicermati, karena ternyata responden yang akhirnya

memutuskan sendiri berangkat ke luar negeri, justru persentasenya terbesar baik untuk kategori ilegal (45,3 %), maupun untuk TKW kategori legal (54,7 %). Kenyataan ini memiliki implikasi khusus dengan semangat, keyakinan dan kesadaran wanita tani di pedesaan atas peran barunya sebagai pencari nafkah keluarga, sekaligus pula memiliki makna “*pembebasan diri dari tembok pembatas tradisi hegemoni patriarkhi*” yang selama ini membatasinya, (melalui berbagai aktivitas domestik keluarganya). Meskipun demikian, pertimbangan atau persetujuan dari orang tuanya, nampak masih cukup penting, dimana persentase ini terlihat sama besar (44,7%) baik untuk TKW Legal maupun Ilegal.

**Tabel 4.22**  
**Distribusi TKW Legal/Ilegal Menurut Keputusan Migrasi**

Pihak yang Memutuskan bermigrasi	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
1. Tidak ingat	--	--	1	0,7	1	0,0
2. Diputus sendiri	82	54,7	68	45,3*	150	50,0 *
3. Bersama or.tua	67	44,7	67	44,7	134	45,0
4. Bersama suami	1	0,6	14	9,3	15	5,0
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,0

Sumber : data Primer (\* Keterangan : diputuskan sendiri)

#### 4.6.11.Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Gambaran tentang dampak migrasi TKW bagi kesejahteraan keluarga di daerah asalnya; baik yang bermigrasi secara legal maupun ilegal ke luar

negeri, dapat dilihat dari data temuan lapangan sebagai berikut (Tabel 4.23). Untuk kelompok responden TKW Legal, bagian terbesar dari mereka (83,0%) mengaku kesejahteraan keluarga di desa asalnya sangat meningkat. Hanya sebagian kecil (14,0%) yang mengaku cukup meningkat. Sedangkan untuk kelompok responden TKW Ilegal, antara mereka yang mengaku kesejahteraan keluarganya sangat meningkat dengan yang cukup meningkat persentasenya hampir berimbang. (50,0% dan 47,0%) Meskipun demikian, tidak semua TKW ini sukses bekerja di luar negeri. Ada 2,0 % yang mengaku gagal bekerja di luar negeri dan ketika pulang kembali ke tanah air, mengaku masih punya hutang, yakni pinjaman untuk biaya migrasi pertama kali.

**Tabel 4.23**  
**Peningkatan Kesejahteraan Keluarga TKW Legal/Ilegal**

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga TKW	TKW Legal		TKW Ilegal		Jumlah	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	%
1. Sama saja	4	0,3	2	1,0	6	2,0
2. Sngt meningkat	125	83,0	75	50,0	200	67,0
3. Ckp meningkat	21	14,0	70	47,0	91	30,0
4. Punya hutang		--	3	2,0	3	1,0
Jumlah	150	100,0	150	100,0	300	100,0

Sumber : Data Primer, diolah.

Jika dilihat hanya dari ukuran ekonomi saja, nampak jelas bahwa, dampak migrasi sementara TKW ke luar negeri bagi daerah asal, baik untuk kategori legal maupun ilegal, mayoritas di antaranya menyatakan telah

memperoleh peningkatan kesejahteraan, bahkan ada yang mengaku sangat meningkat dari sebelum bekerja di luar negeri. Hasil ini tidak banyak berbeda dengan temuan-temuan penelitian migrasi sebelumnya yang sudah disebutkan di bagian latar belakang studi ini (lihat: Nasution, 1997 ; Mantra, Kasto dan Jeremias T Keban, 1999 ; Eki,A.,T, 2002, dan Hugo, 1999 ; 2000b). Tetapi implikasi yang dapat ditarik kemudian adalah bahwa, temuan studi ini memang mendukung asumsi-asumsi teori pilihan rasional yang diajukan dalam disertasi ini.

#### **4.6.12. Perbandingan Temuan Antara TKW Legal dan Ilegal**

Berdasarkan paparan hasil temuan studi tersebut di atas, berikut dapat di susun sebuah tabel ringkasan yang menggambarkan perbandingan ciri-ciri keseluruhan aspek TKW legal maupun ilegal yang telah dibahas itu, berikut hasil-hasilnya, seperti yang disajikan pada halaman 155 di bawah ini.

Nampak dalam Tabel 4.24, bahwa karakteristik sosial, ekonomi dan demografi ke dua kelompok responden TKW ini memiliki perbedaan. TKW kategori legal rata-rata berusia lebih muda, lebih terdidik, lebih “kaya” dan sebagian besar belum menikah, serta lebih banyak yang bekerja – dibandingkan dengan TKW kategori ilegal. Di daerah asal, TKW kategori ilegal lebih banyak yang tidak memiliki tanah pertanian (84,0%) dibandingkan dengan TKW kategori legal (75,0%). Demikian pula dengan

pendapatan keluarga di desa asal, TKW kategori legal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan TKW kategori ilegal. TKW Kategori legal sebagian besar (51,0 %) sudah bekerja di sektor industri sebelum berangkat ke luar negeri, sedangkan TKW kategori ilegal hampir semuanya (98,0%) tidak bekerja sebelum menjadi TKW ke luar negeri. Selanjutnya, tentang faktor pendorong migrasi yang tertinggi, berasal dari Saudara sendiri yakni 40,7 % untuk TKW kategori legal, dan 68,7 % untuk TKW kategori ilegal.

Sementara itu, pengaruh lingkungan yang tertinggi untuk TKW kategori legal adalah pengaruh yang berasal dari kerabat dekat (42,0 %) sedangkan untuk TKW kategori ilegal berasal dari Saudara sendiri (47,3 %) sebagaimana nampak dari data yang disajikan dalam Tabel 4.24 berikut . Untuk peran jaringan migrasi internasional, nampak bahwa, TKW kategori legal bagian terbesar (74,3 %) di antaranya memanfaatkan jaringan PJTKI resmi ke luar negeri, sedangkan untuk TKW kategori ilegal, hampir seluruhnya memanfaatkan peran PL, yakni perantara tenaga kerja tidak resmi.

Tetapi, seperti telah disinggung di atas, temuan yang paling menarik dari studi ini, justru keputusan bermigrasi sudah mayoritas berada di tangan Responden sendiri. Ini memberikan makna dan bahkan bukti tersendiri bagi tesis utama disertasi ini, bahwa keputusan TKW bermigrasi secara legal atau

ilegal ke luar negeri, merupakan wujud perlawanan “laten” dari sebuah emansipasi wanita di pedesaan dewasa ini .

**Tabel 4.24.**  
**Perbandingan Hasil Temuan Antara TKW Legal dan Ilegal**  
**N=300**

No.	Karakteristik TKW	Legal n =(150)	Ilegal n =(150)
1.	Umur rata-rata TKW (tahun).....	Muda (79%)	Tua (85 %)
2.	Status perkawinan (kawin/blm kwn).....	Blm (61,0%)	Kwn (66%)
3.	Pendidikan tertinggi .....	SLTA (61%)	SD (80%)
4.	Pemilikan lahan pertanian (tdk punya).....	Tdk (75%)	Tdk (84%)
5.	Pendapatan keluarga di desa , tertinggi (Rp.100 rb - Rp. 150 rb).....	(64%)	(45%)
6.	Perolehan pekerjaan di desa asal.....	Brh Inds (51,3%)	Tdk Kerja (98%)
7.	Dorongan migrasi dari Saudara.....	(40,7 %)	(68,7 %)
8.	Pengaruh lingkungan TKW.....	Kerabat (42%)	Saudara (47,3%)
9.	Peranan Jaringan migrasi internasional.....	PJTKI (74,3%)	PL (86,0%)
10.	Keputusan bermigrasi Diputus sendiri.....	(54,7%)*	(45,3%)*
11.	Peningkatan kesejahteraan keluarga (sangat meningkat).....	( 83,0%)	(50,0%)
	Total Responden = 300	150	150

Sumber : DataPrimer, diolah.

## 4.7. Analisis Data

### 4.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Besar kecilnya tingkat validitas setiap indikator penelitian ditunjukkan oleh besar kecilnya loading ( $\lambda$ ), pada analisis dengan data *standardized*. Di mana semakin besar  $\lambda$  merupakan indikasi bahwa indikator bersangkutan



semakin valid sebagai instrumen pengukuran variabel penelitian (Oud, 2001 dalam Solimun, 2002:70). Metode yang sering digunakan oleh peneliti-peneliti bidang ekonomi dan sosial, dan juga mudah penerapannya adalah korelasi *Product Moment*. Masrun, 1979 (dalam Solimun, 2002:70) menyatakan bahwa bilamana koefisien korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total seluruh indikator (*corrected item-total correlation*) lebih besar dari 0,3 ( $r \geq 0,3$ ), maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Hasil perhitungan statistik selengkapnya dapat disajikan ke dalam Tabel 4.25 berikut ini.

**Tabel 4.25**  
**Uji Validitas**

Indikator	Korelasi item total	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,4684	Valid
X <sub>2</sub>	0,3165	Valid
X <sub>3</sub>	0,3165	Valid
X <sub>4</sub>	0,5431	Valid
X <sub>5</sub>	-0,4248	Valid
X <sub>6</sub>	-0,4056	Valid
X <sub>7</sub>	0,3830	Valid
X <sub>8</sub>	0,3267	Valid
Z	-0,3932	Valid
Y	-0,3122	Valid

Sumber : Diolah dari lampiran 3

Merujuk pendapat Malhotra, 1996 (dalam Solimun, 2002:71), suatu instrumen (keseluruhan indikator) dianggap sudah cukup reliabel bilamana  $\alpha \geq 0,6$ . Nilai reliabilitas (melihat nilai koefisien *Alpha cronbach*) adalah sebesar  $0,7011 \geq 0.60$ , berarti keseluruhan indikator sudah reliabel. Validitas

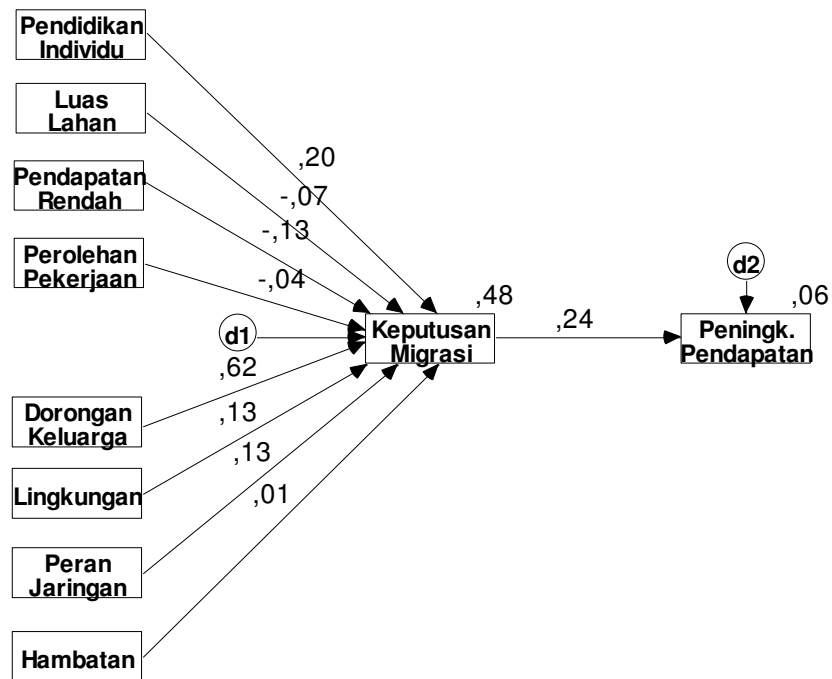
juga telah terpenuhi karena keseluruhan nilai korelasi item total lebih besar dari 0,3. Dengan hasil tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesepuluh variabel tersebut benar-benar valid dan reliabel.

#### **4.7.2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)**

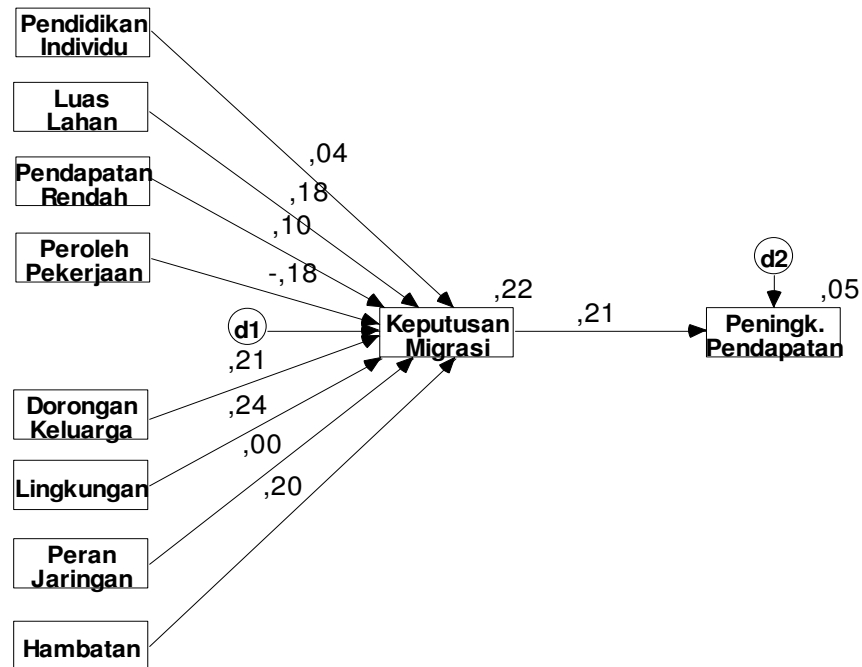
*Path Analysis* digunakan untuk menguji kausalitas yang telah dinyatakan sebelumnya dalam berbagai hubungan sebab akibat, melalui model *Path* akan terlihat ada tidaknya hubungan kausalitas yang dibangun dalam pengujian. Hubungan antar variabel pada studi ini terdiri dari :

- 1) Faktor pendidikan individu, luas lahan, pendapatan, perolehan pekerjaan, dorongan keluarga, lingkungan, peran jaringan dan hambatan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal atau ilegal.
- 2) Keputusan bermigrasi individu TKW secara legal atau ilegal dengan peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah asal.

Hasil analisis jalur untuk menunjukkan hubungan antar variabel baik TKW yang memutuskan bermigrasi secara legal atau ilegal dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6.



**Gambar 4.5**  
**Model Analisis Jalur untuk TKW Legal**



**Gambar 4.6**  
Model Analisis Jalur untuk TKW Ilegal

Model analisis jalur tersebut menggambarkan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang dihipotesiskan.

#### 4.7.3 Pengujian Hipotesis dan Hubungan Kausal

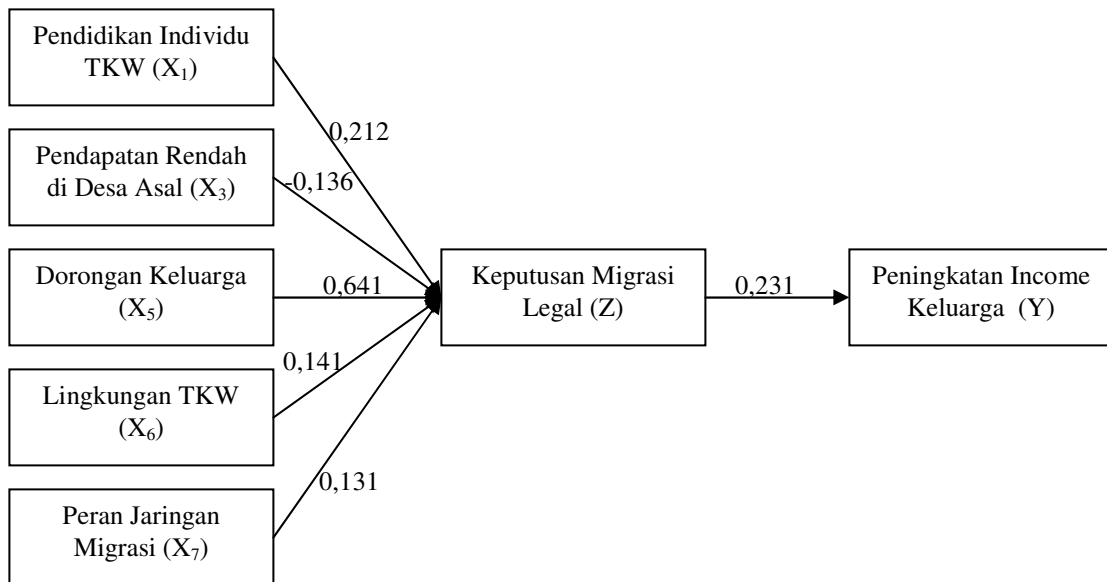
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti yaitu hasil perhitungan pengujian hipotesis antar variabel dapat dilihat pada Tabel 4.26 dan 4.27.

**Tabel 4.26**  
**Hasil Pengujian Hipotesis TKW Legal**

Variabel	Estimate	Standar error	Critical ratio	Probabilitas error	Standardize estimate	Keterangan
$X_1 \rightarrow Z$	0,154	0,049	2,007	0,045	0,212	Signifikan
$X_2 \rightarrow Z$	0,000	0,000	-1,154	0,248	-0,077	Tidak Signifikan
$X_3 \rightarrow Z$	0,000	0,000	-2,003	0,045	-0,136	Signifikan
$X_4 \rightarrow Z$	-0,033	0,050	-0,659	0,510	-0,044	Tidak Signifikan
$X_5 \rightarrow Z$	0,310	0,033	9,386	0,000	0,641	Signifikan
$X_6 \rightarrow Z$	0,090	0,042	2,112	0,035	0,141	Signifikan
$X_7 \rightarrow Z$	0,188	0,094	2,007	0,045	0,131	Signifikan
$X_8 \rightarrow Z$	0,008	0,050	0,152	0,879	0,010	Tidak Signifikan
$Z \rightarrow Y$	0,166	0,074	2,244	0,025	0,231	Signifikan

Sumber : Diolah dari lampiran 4

Agar mudah mahami hasil pengujian hipotesis TKW legal pada Tabel 4.26, berikut ini disajikan besaran koefisien hubungan hasil uji statistik pada Gambar 4.7.



**Gambar : 4.7** Hasil Pengujian Hipotesis TKW Legal

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi TKW untuk bermigrasi secara legal melalui PJTKI adalah faktor pendidikan individu, pendapatan yang rendah di desa asal, adanya dorongan atau

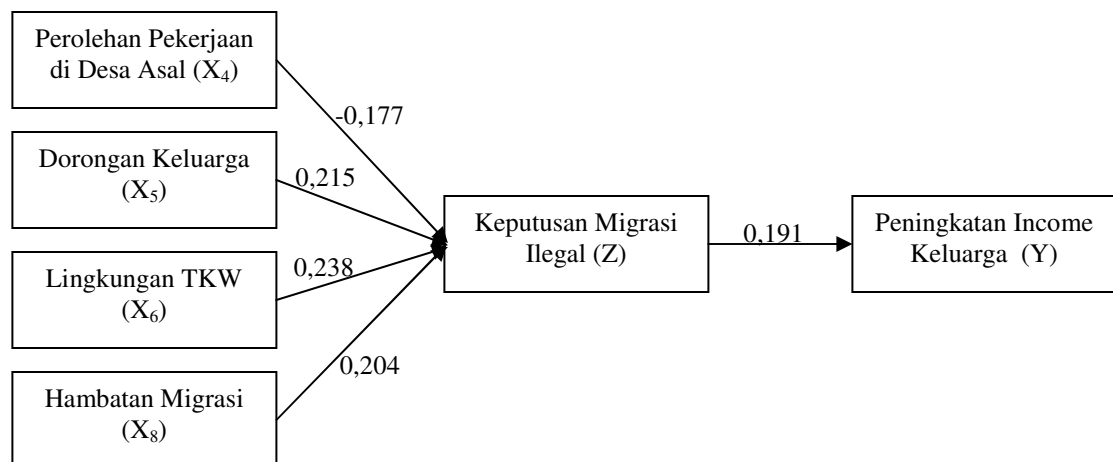
dukungan dari keluarga untuk bermigrasi, lingkungan dari TKW yang telah sukses secara materi setelah bermigrasi ke luar negeri, serta peran dari jaringan migrasi. Sedangkan keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari keluarga di desa asalnya.

**Tabel 4.27**  
**Hasil Pengujian Hipotesis TKW Ilegal**

Variabel	Estimate	Standar error	Critical ratio	Probabilitas error	Standardize estimate	Keterangan
$X_1 \rightarrow Z$	0,071	0,151	0,469	0,639	0,036	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Z$	0,000	0,000	2,294	0,022	0,180	Tidak Signifikan
$X_3 \rightarrow Z$	0,000	0,000	1,278	0,201	0,097	Tidak Signifikan
$X_4 \rightarrow Z$	-0,834	0,382	-2,186	0,029	-0,177	Signifikan
$X_5 \rightarrow Z$	0,182	0,068	2,675	0,007	0,215	Signifikan
$X_6 \rightarrow Z$	0,213	0,069	3,099	0,002	0,238	Signifikan
$X_7 \rightarrow Z$	-0,008	0,156	-0,051	0,959	-0,004	Tidak Signifikan
$X_8 \rightarrow Z$	0,133	0,051	2,609	0,009	0,204	Signifikan
$Z \rightarrow Y$	0,139	0,062	2,257	0,024	0,191	Signifikan

Sumber : Diolah dari lampiran 4

Untuk memudahkan pemahaman hasil pengujian hipotesis TKW ilegal pada Tabel 4.27, berikut disajikan hubungan variabel pada Gambar 4.8



**Gambar : 4.8** Hasil Pengujian Hipotesis TKW Ilegal

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi TKW untuk bermigrasi secara ilegal melalui *Teikong* adalah faktor perolehan pekerjaan di desa asal, adanya dorongan atau dukungan dari keluarga untuk bermigrasi, lingkungan dari TKW yang telah sukses secara materi setelah bermigrasi ke luar negeri, serta hambatan migrasi sehingga mereka memutuskan untuk bermigrasi secara ilegal. Sedangkan keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari keluarga di desa asalnya.

Taraf signifikansi yang digunakan adalah dengan nilai  $t/C.R > \text{nilai } |2|$  (Kline, 1998). Batas nilai C.R untuk menentukan signifikansi estimasi parameter adalah nilai  $C.R. > \text{nilai } |2|$ . Berdasarkan pada pengujian hipotesis Tabel 4.10 dan 4.11 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hipotesis 1: Faktor pendidikan individu TKW, luas lahan, pendapatan, perolehan pekerjaan, dorongan keluarga, lingkungan, peran jaringan migrasi dan hambatan migrasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal

*Standardized regression weight* antara faktor pendidikan individu dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah 0,212 dengan nilai  $t/C.R. = 3,154$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya

signifikan dan positif, artinya semakin tinggi faktor (tingkat pendidikan) individu TKW maka semakin tinggi pula keputusannya untuk bermigrasi secara legal. Hasil ini mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan faktor individu berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara luas lahan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah -0,077 dengan nilai  $t/C.R. = -1,154$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dan berhubungan negatif. Hasil ini menolak hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara pendapatan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah -0,136 dengan nilai  $t/C.R. = -2,003$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan negatif, artinya apabila pendapatan rendah maka keputusan TKW bermigrasi secara legal akan semakin tinggi. Hasil ini mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara perolehan pekerjaan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah -0,044 dengan nilai  $t/C.R. = -$



0,659, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dan berhubungan negatif. Hasil ini menolak hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan perolehan pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara dorongan keluarga dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah 0,641 dengan nilai  $t/C.R. = 9,386$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan positif, artinya semakin tinggi dorongan atau dukungan dari keluarga maka semakin tinggi pula keputusan TKW bermigrasi secara legal. Hasil ini mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan dorongan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara lingkungan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah 0,141 dengan nilai  $t/C.R. = 2,112$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif, artinya semakin tinggi lingkungan (tingkat keberhasilan tetangga yang menjadi TKI) maka semakin tinggi pula keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal. Hasil ini mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan lingkungan TKW berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara peran jaringan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah 0,131 dengan nilai  $t/C.R. = 2,007$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif, artinya semakin tinggi peran jaringan (peran PJTKI dalam kepastian mendapatkan pekerjaan di luar negeri) maka semakin tinggi pula keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal. Hasil ini mendukung hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan peran jaringan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

*Standardized regression weight* antara hambatan dengan keputusan TKW bermigrasi secara legal adalah 0,010 dengan nilai  $t/C.R. = 0,152$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dan berhubungan positif. Hasil ini menolak hipotesis pertama pada penelitian ini yang mengatakan hambatan (proses pengurusan menjadi TKW) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal.

Hipotesis 2: keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga TKW

*Standardized regression weight* antara keputusan TKW bermigrasi secara legal dengan kesejahteraan adalah 0,231 dengan nilai  $t/C.R. = 2,244$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif, artinya keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahtraannya. Hasil ini mendukung

hipotesis ketiga pada penelitian ini yang mengatakan bahwa keputusan TKW bermigrasi secara legal berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Hipotesis 3: Faktor pendidikan individu TKW, luas lahan, pendapatan, perolehan pekerjaan, dorongan keluarga, lingkungan, peran jaringan dan hambatan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal

*Standardized regression weight* antara faktor individu dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah 0,036 dengan nilai  $t/C.R. = 0,469$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dan berhubungan positif. Hasil ini menolak hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa faktor pendidikan individu berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara luas lahan dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah 0,180 dengan nilai  $t/C.R. = 2,294$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif, artinya semakin luas lahan yang dikerjakan maka semakin tinggi keputusan TKW bermigrasi secara ilegal. Hasil ini mendukung hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa

pemilikan luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara pendapatan dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah 0,097 dengan nilai  $t/C.R. = 1,278$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif. Hasil ini menolak hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara perolehan pekerjaan dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah -0,177 dengan nilai  $t/C.R. = -2,186$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan negatif, artinya semakin rendah perolehan pekerjaan di daerah tempat tinggal maka semakin tinggi keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal. Hasil ini mendukung hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa perolehan pekerjaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara dorongan keluarga dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah 0,215 dengan nilai  $t/C.R. = 2,675$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan positif, artinya semakin tinggi dorongan atau dukungan dari keluarga maka semakin tinggi pula keputusan TKW bermigrasi secara ilegal. Hasil ini

mendukung hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa dorongan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara lingkungan dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah 0,238 dengan nilai  $t/C.R. = 3,099$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif, artinya semakin tinggi lingkungan (tingkat keberhasilan tetangga yang menjadi TKI) maka semakin tinggi pula keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal. Hasil ini mendukung hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa lingkungan TKW berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara peran jaringan dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah -0,004 dengan nilai  $t/C.R. = -0,051$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dan berhubungan negatif. Hasil ini menolak hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa peran jaringan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

*Standardized regression weight* antara hambatan dengan keputusan TKW bermigrasi secara ilegal adalah 0,204 dengan nilai  $t/C.R. = 2,609$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan

berhubungan positif, artinya semakin tinggi hambatan yang dirasakan oleh TKW dalam proses pengurusan migrasi maka semakin tinggi pula keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal. Hasil ini mendukung hipotesis keempat pada penelitian ini yang mengatakan bahwa hambatan (proses pengurusan menjadi TKW) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal.

Hipotesis 4: keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan Keluarga TKW

*Standardized regression weight* antara keputusan TKW bermigrasi secara ilegal dengan kesejahteraan adalah 0,191 dengan nilai  $t/C.R. = 2,257$ , dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruhnya signifikan dan berhubungan positif, artinya keputusan TKW untuk bermigrasi secara ilegal akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahtraannya. Hasil ini mendukung hipotesis keenam pada penelitian ini yang mengatakan bahwa keputusan TKW bermigrasi secara ilegal berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan.

**Tabel 4.28**  
**Hasil Pengujian Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total**  
**untuk TKW yang Bermigrasi Secara Legal**

<b>PENGARUH LANGSUNG</b>									
Variabel	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	Z
Z	0,202	-0,074	-0,130	-0,042	0,616	0,135	0,125	0,009	0,000
Y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,244
<b>PENGARUH TIDAK LANGSUNG</b>									
Variabel	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	Z
Z	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Y	0,0493	-0,0180	-0,0317	-0,0102	0,1502	0,0328	0,0306	0,0023	0,0000
<b>PENGARUH TOTAL</b>									
Variabel	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	Z
Z	0,202	-0,074	-0,130	-0,042	0,616	0,135	0,125	0,009	0,000
Y	0,0493	-0,0180	-0,0317	-0,0102	0,1502	0,0328	0,0306	0,0023	0,244

Sumber : Diolah dari lampiran 4

Tabel 4.28 menunjukkan besarnya pengaruh langsung faktor pendidikan individu terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 20,2%, luas lahan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 7,4%, pendapatan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 13,0%, perolehan pekerjaan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 4,2%, dorongan keluarga terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 61,6%, lingkungan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 13,5%, peran jaringan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 12,5%, hambatan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal sebesar 9,0%, serta pengaruh langsung keputusan TKW bermigrasi secara legal terhadap kesejahteraan sebesar 24,4%.

Pengaruh tidak langsung faktor pendidikan individu terhadap kesejahteraan sebesar 4,93%, luas lahan terhadap kesejahteraan sebesar 1,80%, pendapatan terhadap kesejahteraan sebesar 3,17%, perolehan pekerjaan terhadap kesejahteraan sebesar 1,02%, dorongan keluarga terhadap kesejahteraan sebesar 15,02%, lingkungan terhadap kesejahteraan sebesar 3,28%, peran jaringan terhadap kesejahteraan sebesar 3,06%, dan hambatan terhadap kesejahteraan sebesar 0,23%.

Hasil pengujian hipotesis di atas memberikan sebuah gambaran tentang variabel yang mempunyai pengaruh langsung terbesar terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal, yaitu dorongan keluarga. Hal ini setidaknya memberikan penjelasan bahwa alasan utama TKW bermigrasi secara legal disebabkan oleh adanya persetujuan yang didapatkan dari keluarga baik suami, anak ataupun orang tua. Selain itu, pengujian yang dilakukan berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan faktor yang mempunyai pengaruh langsung terbesar terhadap kesejahteraan TKW adalah keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal. Hal ini dapat diartikan bahwa keputusan TKW untuk bermigrasi telah mampu meningkatkan perekonomiannya di daerah asal.

Persamaan struktural hubungan kausalitas untuk TKW yang bermigrasi secara legal adalah sebagai berikut :



1. Pengaruh faktor pendidikan individu TKW ( $X_1$ ), luas lahan ( $X_2$ ), pendapatan ( $X_3$ ), perolehan pekerjaan ( $X_4$ ), dorongan keluarga ( $X_5$ ), lingkungan ( $X_6$ ), peran jaringan ( $X_7$ ) dan hambatan ( $X_8$ ) terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal ( $Z$ )

$$Z = 0,202 X_1 - 0,074 X_2 - 0,130 X_3 - 0,042 X_4 + 0,616 X_5 + 0,135 X_6 + 0,125 X_7 + 0,009 X_8$$

2. Pengaruh keputusan TKW bermigrasi secara legal ( $Z$ ) terhadap kesejahteraan ( $Y$ )

$$Y = 0,244 Z$$

**Tabel 4.29**  
**Hasil Pengujian Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Pengaruh Total**  
**untuk TKW yang Bermigrasi Secara Ilegal**

PENGARUH LANGSUNG									
Variabel	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	Z
Z	0,036	0,178	0,096	-0,175	0,214	0,236	-0,004	0,202	0,000
Y	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215
PENGARUH TIDAK LANGSUNG									
Variabel	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	Z
Z	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Y	0,0077	0,0382	0,0207	-0,0377	0,0461	0,0507	-0,0008	0,0434	0,0000
PENGARUH TOTAL									
Variabel	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$X_6$	$X_7$	$X_8$	Z
Z	0,036	0,178	0,096	-0,175	0,214	0,236	-0,004	0,202	0,000
Y	0,0077	0,0382	0,0207	-0,0377	0,0461	0,0507	-0,0008	0,0434	0,215

Sumber : Diolah dari lampiran 4

Tabel 4.29 menunjukkan besarnya pengaruh langsung faktor pendidikan individu terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 3,6%, luas lahan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal

sebesar 17,8%, pendapatan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 9,6%, perolehan pekerjaan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 17,5%, dorongan keluarga terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 21,4%, lingkungan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 23,6%, peran jaringan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 0,4%, hambatan terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal sebesar 20,2%, serta pengaruh langsung keputusan TKW bermigrasi secara ilegal terhadap kesejahteraan sebesar 21,5%.

Pengaruh tidak langsung faktor pendidikan individu terhadap kesejahteraan sebesar 0,77%, luas lahan terhadap kesejahteraan sebesar 3,82%, pendapatan terhadap kesejahteraan sebesar 2,07%, perolehan pekerjaan terhadap kesejahteraan sebesar 3,77%, dorongan keluarga terhadap kesejahteraan sebesar 4,61%, lingkungan terhadap kesejahteraan sebesar 5,07%, peran jaringan terhadap kesejahteraan sebesar 0,08%, dan hambatan terhadap kesejahteraan sebesar 4,34%.

Hasil pengujian hipotesis di atas memberikan sebuah gambaran tentang variabel yang mempunyai pengaruh langsung terbesar terhadap keputusan TKW bermigrasi secara ilegal, yaitu lingkungan. Hal ini setidaknya memberikan penjelasan bahwa alasan utama calon TKW bermigrasi secara legal disebabkan oleh contoh konkrit perekonomian dari

lingkungan sekitar yang telah sukses. Selain itu, pengujian yang dilakukan berdasarkan Tabel 4.29 menunjukkan faktor yang mempunyai pengaruh langsung terbesar terhadap kesejahteraan TKW adalah keputusan TKW untuk bermigrasi secara legal. Hal ini dapat diartikan bahwa keputusan dari TKW untuk bermigrasi telah mampu meningkatkan perekonomiannya di daerah asal.

Persamaan struktural hubungan kausalitas untuk TKW yang bermigrasi secara legal adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh faktor individu ( $X_1$ ), luas lahan ( $X_2$ ), pendapatan ( $X_3$ ), perolehan pekerjaan ( $X_4$ ), dorongan keluarga ( $X_5$ ), lingkungan ( $X_6$ ), peran jaringan ( $X_7$ ) dan hambatan ( $X_8$ ) terhadap keputusan TKW bermigrasi secara legal ( $Z$ )

$$Z = 0,036 X_1 + 0,178 X_2 + 0,096 X_3 - 0,175 X_4 + 0,214 X_5 + 0,236 X_6 - 0,004 X_7 + 0,202 X_8$$

2. Pengaruh keputusan TKW bermigrasi secara ilegal ( $Z$ ) terhadap kesejahteraan ( $Y$ )

$$Y = 0,215 Z$$

### **5.Uji Perbedaan (Uji T) Variabel untuk TKW Legal dan Ilegal**

Selain melihat hubungan sebab akibat, dalam penelitian ini juga menguji perbedaan tiap variabel yang berpengaruh antara TKW legal dan

TKW ilegal. Uji *t paired* berfungsi untuk menguji dua sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah sama. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka akan dibahas secara lengkap dalam uraian berikut ini.

### 1. Faktor pendidikan individu TKW

Tabel 4.30 menunjukkan hasil uji beda faktor pendidikan individu antara TKW legal dan TKW ilegal.

Tabel 4.30.

		Independent Samples Test									
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
X1	Equal variances assumed	102,939	,000	9,446	298	,000	,61	,064	,480	,733	
	Equal variances not assumed			9,446	214,489	,000	,61	,064	,480	,733	

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya kedua rata-rata populasi adalah identik.
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya kedua rata-rata populasi adalah tidak identik.

Tabel 4.31 terlihat bahwa F hitung untuk faktor individu dengan *equal variance assumed* adalah 102,939 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, atau kedua varian tidak identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat

perbedaan faktor individu (pendidikan) antara TKW legal dan TKW ilegal.

## 2. Luas Pemilikan Lahan

Berikutnya, untuk variabel Luas Pemilikan Lahan di daerah asal, Tabel 4.31 di halaman ini menunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4.31

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
X2	Equal variances assumed	30,523	,000	2,796	298	,006	547,33	195,762	162,082	932,585
	Equal variances not assumed			2,796	252,445	,006	547,33	195,762	161,798	932,869

Tabel 4.31 terlihat bahwa F hitung untuk luas lahan dengan *equal variance assumed* adalah 30,523 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, atau kedua varian tidak identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan luas lahan antara TKW legal dan TKW ilegal.

## 3. Pendapatan di Daerah Asal

Tabel 4.32

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
X3	Equal variances assumed	1,178	,279	1,975	298	,049	12995,32	6578,531	49,054	25941,581
	Equal variances not assumed			1,975	297,845	,049	12995,32	6578,531	49,027	25941,608

Tabel 4.32 terlihat bahwa F hitung untuk variabel pendapatan dengan *equal variance assumed* adalah 1,178 dengan probabilitas 0,279. Oleh karena probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, atau kedua varian identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara rata-rata tidak terdapat perbedaan pendapatan antara TKW legal dan TKW ilegal.

#### 4. Perolehan Pekerjaan

Tabel 4.33

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
X4	Equal variances assumed	191,135	,000	14,698	298	,000	,84	,057	,728	,952
	Equal variances not assumed			14,698	161,483	,000	,84	,057	,727	,953

Tabel 4.33 terlihat bahwa F hitung untuk variabel pekerjaan dengan *equal variance assumed* adalah 191,135 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, atau kedua varian tidak identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pekerjaan antara TKW legal dan TKW ilegal.

#### 5. Dorongan Keluarga

(Tabel 4.34 di halaman berikut)

Tabel 4.34

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
X5	Equal variances assumed	39,572	,000	-4,731	298	,000	-,51	,109	-,727	-,300
	Equal variances not assumed			-4,731	273,952	,000	-,51	,109	-,727	-,300

Tabel 4.34 terlihat bahwa F hitung untuk variabel dorongan keluarga dengan *equal variance assumed* adalah 39,572 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, atau kedua varian tidak identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan variabel dorongan keluarga antara TKW legal dan TKW ilegal.

## 6. Lingkungan TKW di Daerah Asal

Tabel 4.35

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
X6	Equal variances assumed	1,079	,300	-1,042	298	,298	-,09	,090	-,270	,083
	Equal variances not assumed			-1,042	295,592	,298	-,09	,090	-,270	,083

Tabel 4.35 terlihat bahwa F hitung untuk variabel lingkungan dengan *equal variance assumed* adalah 1,079 dengan probabilitas 0,300. Oleh karena probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, atau kedua varian identik. Dengan

hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara rata-rata tidak terdapat perbedaan variabel lingkungan antara TKW legal dan TKW ilegal.

## 7. Peran Jaringan Migrasi

Tabel 4.36

		Levene's Test for quality of Variance		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Confidence Interval of the Differe	
									Lower	Upper
X7	Equal varianc assumed	,370	,544	13,175	298	,000	7777777778	29994749230	437190405343	118365150218
	Equal varianc not assumed			13,175	294,334	,000	7777777778	29994749230	433262013819	122293541741

Tabel 4.36 terlihat bahwa F hitung untuk variabel peran jaringan dengan *equal variance assumed* adalah 0,370 dengan probabilitas 0,544. Oleh karena probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, atau kedua varian identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara rata-rata tidak terdapat perbedaan peran jaringan antara TKW legal dan TKW ilegal.

## 8. Hambatan Migrasi

Tabel 4.37

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Y	Equal variances assumed	14,959	,000	62,409	298	,000	4,52	,072	4,381	4,666
	Equal variances not assumed			62,409	255,662	,000	4,52	,072	4,381	4,666



Tabel 4.37 terlihat bahwa F hitung untuk variabel peran jaringan dengan *equal variance assumed* adalah 14,959 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas < 0,05, maka  $H_0$  ditolak, atau kedua varian tidak identik. Dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara rata-rata terdapat perbedaan hambatan antara TKW legal dan TKW ilegal.

#### 9. Tabel Ringkasan Analisis.

Selanjutnya, faktor - faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan bermigrasi tersebut di atas (mulai dari variabel X1 yaitu faktor pendidikan individu TKW sampai X 8 variabel Hambatan migrasi) dapat disajikan ke dalam Tabel 4.38.

**Tabel 4.38**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan Bermigrasi**

No.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Pengambilan Keputusan Migrasi	
		Legal	Ilegal
1.	Faktor Pendidikan Individu TKW (X1)	X	--
2	Pemilikan Luas Lahan Pertanian (X2)	--	--
3	Pendapatan Keluarga di Daerah Asal (X3)	X	X
4	Perolehan Pekerjaan di Daerah Asal (X4)	--	X
<b>5</b>	Dorongan Keluarga (X5)	X	X
<b>6</b>	Lingkungan TKW (X6)	X	X
7	Peran Jaringan Migrasi (X7)	X	--
8	Hambatan Migrasi (X8)	--	X
9	Dampak Terhadap Peningkatan Kesejahteraan(X9)	X	X
10	Faktor yang Paling Kuat Berpengaruh	<b>5</b>	<b>6</b>
	<i>Keterangan :</i> (X) = ada pengaruh ( -- ) = tidak ada pengaruh	5 =Dorongan Keluarga	6 = Lingkungan TKW

Sumber : Data primer, diolah.